



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

KECAMATAN BALONGBENDO



MARET 2023



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas hidayah-Nya dokumen "**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026**" telah kami susun sebagai arah dan pedoman bagi Kecamatan Balongbendo untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Balongbendo ini merupakan implementasi berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Desain program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050/5889 Tahun 2021.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan (data dan informasi) dalam penyelesaian dokumen RENSTRA ini. Akhir kata semoga dokumen RENSTRA Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo ini dapat memberikan informasi kepada stakeholders dan pihak-pihak terkait.

Sidoarjo, 31 Maret 2023

**CAMAT BALONGBENDO
KABUPATEN SIDOARJO**



ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM

Pembina

NIP. 19790114 199711 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.1.1 Pengertian Renstra SKPD	I-1
1.1.2 Fungsi Renstra SKPD dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	I-2
1.1.3 Proses Penyusunan Renstra PD.....	I-2
1.1.4 Keterkaitan Renstra PD dengan (i) RPJMD, (iii) Renstra (K/L) & (iii) Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Renja PD	I-4
1.1.5 Narasi Alasan Perubahan Renstra	I-7
1.2 Landasan Hukum.....	I-7
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	I-10
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD	II-1
2.1 Tugas, Fungsinya Dan Struktur Organisasi PD.....	II-1
2.2 Sumber Daya PD (SDM/Asset, Modal dan Unit Usaha yang masih operasional)	II-3
2.3 Kinerja Pelayanan PD.....	II-16
2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD	II-16
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD.....	II-23
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....	II-25
2.4.1 Hasil Analisis terhadap Dokumen Renstra K/L	II-25
2.4.2 Hasil Analisis terhadap Dokumen Renstra PD Provinsi.....	II-26
2.4.3 Hasil Analisis terhadap Telaahan Dokumen RTRW	II-26
2.4.4 Hasil Analisis terhadap Telaahan Dokumen KLHS.....	II-29
2.5 Kerjasama Daerah.....	II-29



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

- 2.6 Keterhubungan dan Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan Tujuan Sasaran Perangkat Daerah dalam Dokumen Renstra PD..... II-30
2.6.1 Data Pendukung Indikator Kinerja..... II-30

BAB III ISU – ISU STRATEGIS.....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Pelayanan PD	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	III-7
3.4 Telaah Rancangan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-9
3.5 Penentu Isu-Isu Strategis.....	III-11
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD.....	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.1 Strategi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidorarjo	V-1
5.2 Arah Kebijakan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.....	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
6.1 Konsistensi dan Keterhubungan Antara Dokumen Renstra PD Dengan Dokumen RPJMD.....	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
7.1 Keterhubungan dan Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dalam Dokumen Renstra PD	VII-1
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-1

Lampiran

1. Form E73 Ceklist Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Perubahan Renstra PD oleh Kepala Perangkat Daerah



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

2. Form E80 Hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap valuasi Renstra PD Tahun 2021-2026
3. Berita Acara Perubahan Renstra Tahun 2021-2026
4. Dokumentasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026
5. SOP Reviu Perubahan Renstra
6. SK Penetapan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Tahun 2021-2026
7. Matriks Perubahan Renstra Tahun 2021-2026



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Berdasarkan ASN dan Non ASN	II-7
Tabel 2.2 Berdasarkan Umur	II-7
Tabel 2.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	II-8
Tabel 2.4 Berdasarkan Golongan	II-9
Tabel 2.5 Berdasarkan Eselon	II-10
Tabel 2.6 Eksisting Kebutuhan Pegawai Kecamatan Balongbendo	II-10
Tabel 2.7 Peralatan dan Mesin	II-14
Tabel 2.8 Hasil Kinerja Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2020.....	II-18
Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2021.....	II-24
Tabel 2.10Komparasi Capaian Sasaran Renstra Kecamatan Balongbendo terhadap Sasaran Renstra K/L.....	II-25
Tabel 2.11Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kecamatan Balongbendo	II-26
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	III-1
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-5
Tabel 3.3 Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024	III-7
Tabel 3.4 Telaah Renstra Kementerian.....	III-8
Tabel 3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo	III-10
Tabel 3.6 Skor Kriteria Penentu Isu-Isu Strategis.....	III-12
Tabel 3.7 Total Skor Isu-Isu Strategis	III-12
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-3
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan.....	V-2
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan,dan Pendanaan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.....	VI-5
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Arsitektur Kinerja Pembangunan	I-3
Gambar 1.2 Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra SKPD.....	I-4
Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan di Daerah	I-6
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Balongbendo	II-2
Gambar 2.2 Berdasarkan Umur	II-8
Gambar 2.3 Persentase Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-9

The image features a large, faint watermark of the official logo of Kabupaten Sidoarjo. The logo is a shield-shaped emblem with a five-pointed star at the top. Below the star is a circular wreath containing a stylized bird or figure. At the bottom of the wreath, a banner reads "KABUPATEN SIDOARJO".

BAB I
PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Pengertian Renstra SKPD

Perencanaan strategis merupakan salah satu metode yang digunakan didalam perencanaan pembangunan. Pada perencanaan strategis dijadikan alat yang dapat digunakan oleh organisasi pemerintah dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi pemerintah itu sendiri maupun dari luar pemerintahan. Implementasi perencanaan strategis dalam perencanaan pembangunan di Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Secara spesifik perencanaan strategis diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam pasal 1 ayat 29 permendagri 86 tahun 2017 Rencana Strategis perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam pasal 13 juga dijelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau perundang-undangan maka perlunya melakukan pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kemenpan Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini maka ditetapkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga perlunya untuk dilakukan perubahan Renstra PD.

1.1.2 Fungsi Renstra SKPD dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong adanya proses pembangunan secara terpadu efisien, perencanaan pembangunan mempunyai 5 (lima) tujuan dan fungsi pokok yakni:

- a. Mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan adil.

Dengan demikian fungsi Renstra PD adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan sasaran pencapaian yang jelas dan terukur.

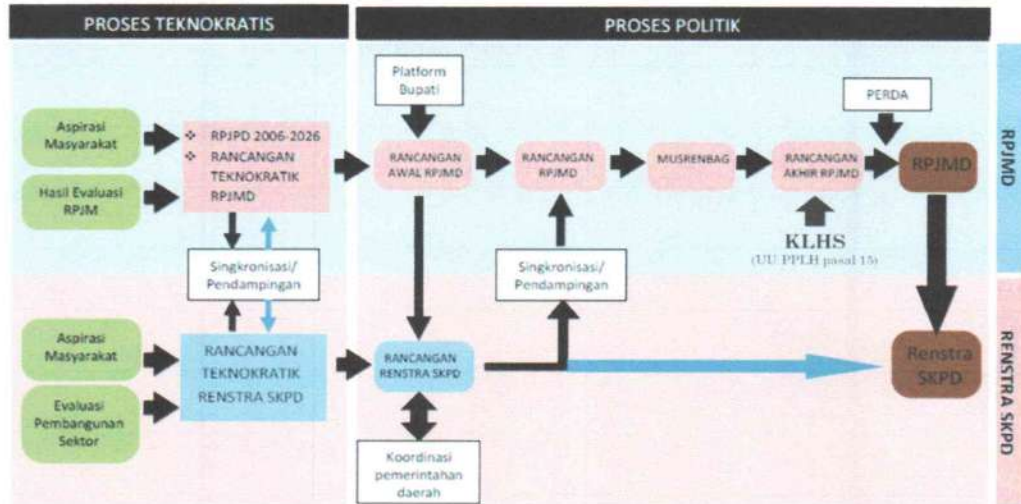
1.1.3 Proses Penyusunan Renstra PD

Berangkat pada amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Kecamatan Balongbendo Tahun 2021-2026. Dokumen ini merupakan sebagai alat perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman pencapaian visi pembangunan Daerah Kabupaten Siodarjo Tahun 2021-2026. Penyusunan dokumen ini secara teknis merujuk pada arsitektur kinerja pembangunan yang secara umum terdiri dari dua rangkaian proses yaitu



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

pada proses teknokratis dan proses politik. Rangkaian proses tersebut ditunjukkan pada gambar 1.1 yang merupakan proses penyusunan Renstra dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD sebab keduanya memiliki keterkaitan yang erat yaitu dalam konteks proses maupun konteks dari kedua dokumen tersebut yang saling keterkaitan satu sama lainnya.



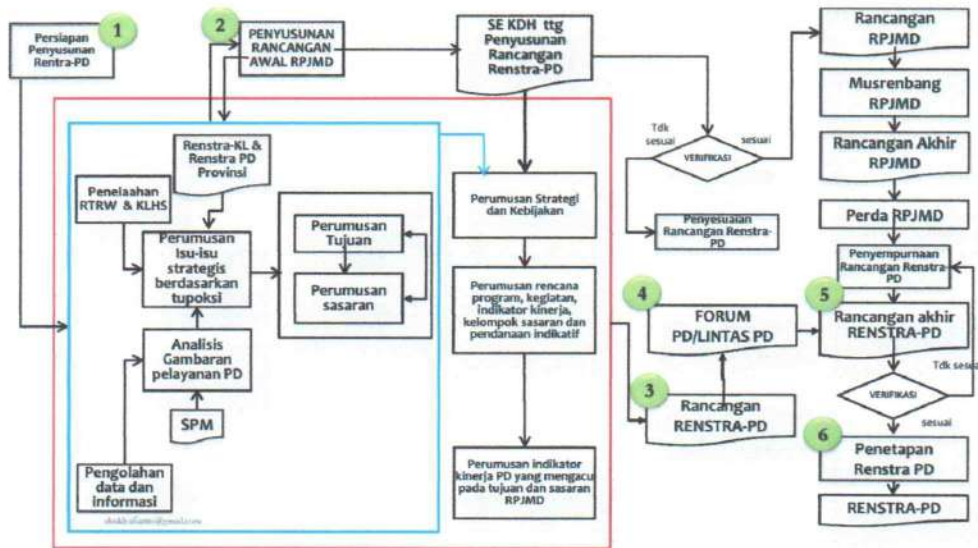
Gambar 1.1
Arsitektur Kinerja Pembangunan

Rancangan akhir Renstra Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo disusun berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang juga disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Balongbendo. Proses politik selanjutnya adalah sinkronisasi dan pendampingan rancangan Renstra Kecamatan Balongbendo untuk melengkapi rancangan RPJMD. Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD ini dibahas bersama antara pemerintah Kabupaten dengan DPRD dalam forum rapat pleno DPRD tentang penetapan RPJMD untuk dijadikan Perda RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026. Perda dimaksud akan dijadikan rujukan hukum untuk menetapkan Rancangan Renstra Kecamatan Balongbendo menjadi Renstra Kecamatan Balongbendo. Renstra Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan oleh Camat harus sinkron dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo secara terperinci merujuk pada prosedur yang diatur dalam



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2 berikut ini.



Gambar 1.2

Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Balongbendo Kabupaten

Sidoarjo antara lain memuat analisis gambaran pelayanan perangkat daerah pada periode sebelumnya, isu-isu strategis Kecamatan Balongbendo berdasarkan tupoksi, hasil penelaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi dimana Renstra K/L dan Renstra Provinsi yang ditelaah adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2019-2024. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan

1.1.4 Keterkaitan Renstra PD dengan (i) RPJMD, (ii) Renstra K/L & (iii) Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan (iv) dengan Renja PD

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), yang berbunyi: Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib



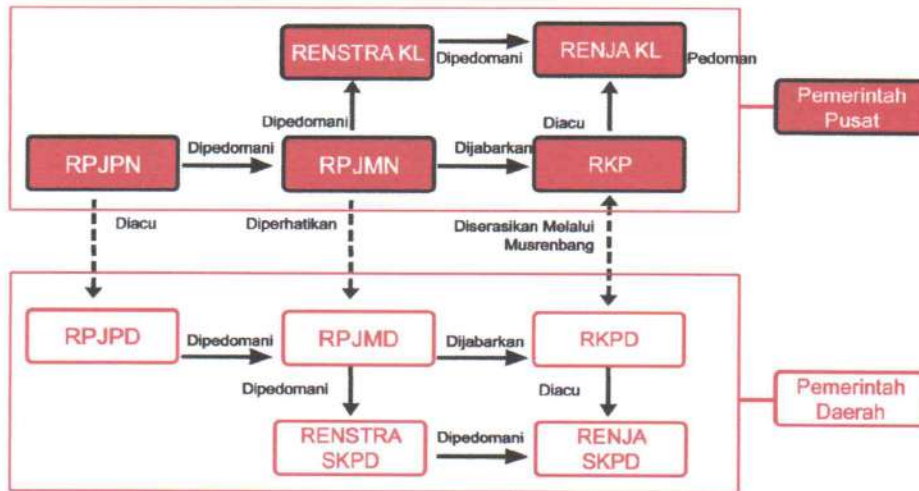
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Pasal 273 ayat (1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode (satu) tahun. Dengan demikian maka hubungan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat.

Renstra Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo juga merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu maka Renstra ini memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang lain, baik pada level yang lebih tinggi atau ruang lingkup yang lebih luas, maupun pada level dan ruang lingkup yang lebih rendah dan lebih kecil. Gambar 1.3 berikut ini menjelaskan tentang keterkaitan antara Renstra Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026



Gambar 1.3

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan di Daerah

Renstra Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo menurut gambar di atas dipedomani oleh RPJMD Kabupaten Sidoarjo dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Kesatuan berbagai dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dimaksudkan untuk menjamin adanya kesatuan arah pembangunan, untuk mencapai visi pembangunan yang terukur kinerja pembangunannya; baik kinerja input yang terlihat pada besaran sumber daya yang digunakan untuk pembangunan, kinerja output yang dilihat dari apa yang dikerjakan dan dihasilkan suatu kegiatan, kinerja outcome yang teridentifikasi dari apa yang dicapai dari suatu program dan akhirnya kinerja impact yang tergambar oleh adanya perubahan sebagaimana tertuang dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam konteks praktis maka Kecamatan Balongbendo dalam melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan, artinya Rencana Strategisnya berpedoman pada misi pertama RPJMD Kabupaten Sidoarjo yaitu pada pelayanan yang ada setiap bidang pelayanan yang saat ini berdedikasi pada sistem aplikasi pada pelayanan yang memudahkan agar tercapainya efektifitas, efisiensi, transparansi dan responsifitas.



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

1.1.5 Narasi Alasan Perubahan Renstra

Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Renstra 2021-2026. Penerapan pendekatan kinerja bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut pemerintahan daerah fokus pada kinerja terukur dari program kerjasama dengan detail aktivitas dengan mempertimbangkan asas efektivitas, efisiensi dan ekonomis.

Dalam rangka mencapai tujuan keselarasan kejelasan dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah perlu memutakhirkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintahan daerah secara elektronik dengan dukungan sistem informasi pemerintahan daerah.

Kemendagri 050-5889 tahun 2021 ditunjukkan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintahan daerah dalam proses perencanaan pembangunan dan keuangan daerah informasi yang dimaksud. Membantu organisasi perangkat daerah OPD dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah membantu organisasi perangkat daerah OPD dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah membantu organisasi perangkat daerah OPD dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat mendukung penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan daerah .

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dilandasi oleh berbagai peraturan hukum sebagaimana disebutkan dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo;
25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo;
26. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

27. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
28. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Renstra PD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
30. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022 tentang Renja PD Tahun 2023;
31. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Renja PD Tahun 2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balongbendo Tahun 2021-2026 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah pembangunan di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Membantu dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- c. Membantu dalam sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD;
- d. Sebagai dasar/pijakan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yakni Renja/RKT, RKA dan DPA-PD Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar pada sistematika penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsinya, dan Struktur Organisasi PD
- 2.2 Sumber daya PD (SDM, Asset/Modal dan Unit Usaha yang masih Operasional)
- 2.3 Kinerja Pelayanan PD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Terkait
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

The background features a large, faint watermark of the official logo of Kabupaten Sidoarjo. The logo is a shield-shaped emblem with a five-pointed star at the top. Below the star is a circular emblem containing a stylized figure, possibly a deity or a symbol of justice, surrounded by a wreath of rice stalks. At the bottom of the shield, a banner contains the text "KABUPATEN SIDOARJO".

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PD



BAB II

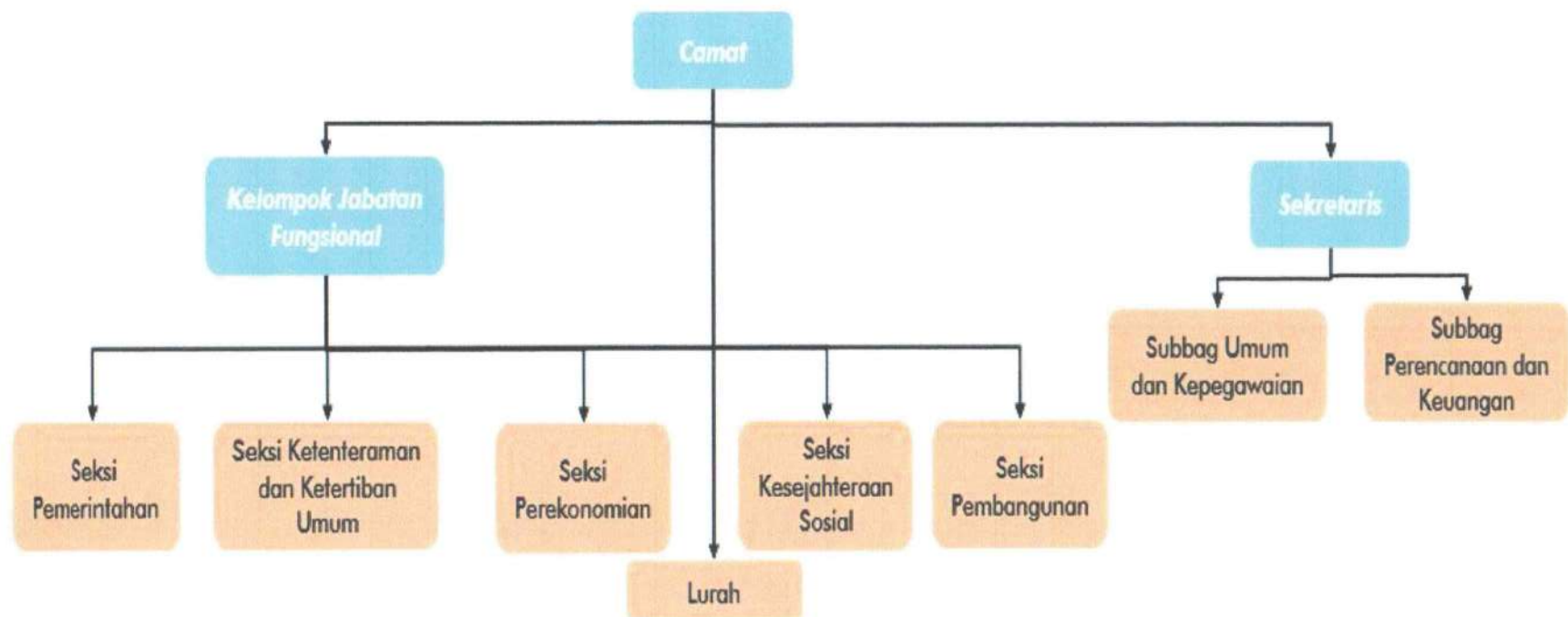
GAMBARAN PELAYANAN PD

2.1 TUGAS, FUNGSINYA DAN STRUKTUR ORGANISASI PD

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan. Dipimpin oleh seorang Camat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya

Untuk dapat menjalankan fungsi yang telah ditetapkan, Kecamatan Balongbendo memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Balongbendo



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

2.2 SUMBER DAYA PD (SDM, ASSET/MODAL DAN UNIT USAHA YANG MASIH OPERASIONAL)

Uraian tugas sesuai dengan struktur Organisasi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Camat

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Camat berwenang menandatangani:

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai kewenangannya;
- b. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
- c. Legalisasi Salinan Dokumen Kependudukan;
- d. Kartu Ketenagakerjaan (AK I, AK II, AK III, AK IV, dan AK V);
- e. Rekomendasi penutupan/ penggunaan jalan lokal/ desa;
- f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
- g. Izin Gangguan (HO) Usaha Mikro;
- h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi penyusunan perencanaan, pelaporan, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan serta pelayanan umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi- seksi;
- c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kantor;
- c. menerima permohonan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

- d. menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. melaksanakan pembinaan kepegawaian;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugasnya

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan perencanaan program;
- b. mengelola administrasi keuangan termasuk gaji pegawai;
- c. menyiapkan rencana kebutuhan anggaran;
- d. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaannya;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. pelaksanaan teknis kegiatan bidang pemerintahan, meliputi:
 1. pengesahan pergantian antar waktu dan pemberhentian karena pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 2. evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa;
 3. pengambilan sumpah dan janji anggota badan permusyawaratan desa;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pemerintahan;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

ketenteraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelaksanaan teknis kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum, antara lain:
 1. pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 2. penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 3. pengawasan dan penertiban usaha (bangunan/ reklame liar);
 4. penanganan konflik sosial;
- c. memproses permohonan Izin Gangguan usaha mikro;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya

5. Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perekonomian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Seksi Perekonomian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang perekonomian;
- b. pelaksanaan teknis kegiatan di bidang perekonomian, meliputi:
 1. pembinaan usaha ekonomi masyarakat;
 2. pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- c. pemrosesan permohonan perizinan, meliputi:
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro.
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang perekonomian;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perekonomian;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Seksi Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- b. pelaksanaan teknis kegiatan bidang urusan kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, meliputi:
 1. pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan;
 2. pembinaan kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan.
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

7. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Seksi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pembangunan dan lingkungan;
- b. pelaksanaan teknis kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan, meliputi:
 1. pembinaan penanganan sampah domestik;
 2. pembinaan lembaga dan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup.
- c. pemrosesan permohonan perizinan, meliputi:
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) usaha mikro;
 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal satu lantai dengan maksimal luasan bangunan 400 m² (empat ratus meter persegi).
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan serta lingkungan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti Sumber Daya Manusia



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

(SDM) serta sarana dan prasarana. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya - sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugasnya.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan modal penting yang menentukan perkembangan organisasi kearah yang lebih baik. Pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) atau aparatur di lingkungan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu faktor kunci bagi keberhasilan organisasi dalam upaya membangun sistem transportasi yang handal. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas setiap aparatur harus terus menerus dilakukan evaluasi untuk selanjutnya dilakukan peningkatan melalui berbagai kegiatan peningkatan SDM baik melalui penyegaran maupun mekanisme pendidikan dan latihan yang ada. Total terdapat 23 orang PNS di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dan pegawai Non PNS sebanyak 13 orang.

Tabel 2.1

Berdasarkan ASN dan Non ASN

URAIAN	TOTAL
ASN	23
NON ASN	13
TOTAL	36

Sumber : Kecamatan Balongbendo 31 Desember 2022

Dengan total keterangan ASN dan Non ASN tersebut tentunya tidak lepas dengan berdasarkan umur dan tingkat pendidikan.

Tabel 2.2

Berdasarkan Umur

UMUR	TOTAL	PERSENTASE
21-30	8	22,22
31-40	7	19,44
41-50	11	30,56
51-58	10	27,78
TOTAL	36	100,00

Sumber : Kecamatan Balongbendo 31 Desember 2022

Dengan tabel diatas bahwa pada umur 21-30 Tahun berjumlah 8 orang, 31-40 Tahun berjumlah 7 orang, 41-50 Tahun berjumlah 11 orang, 51-58 Tahun berjumlah 10 orang. Maka pada umur 41-50 Tahun merupakan umur dengan persentase terbanyak yaitu

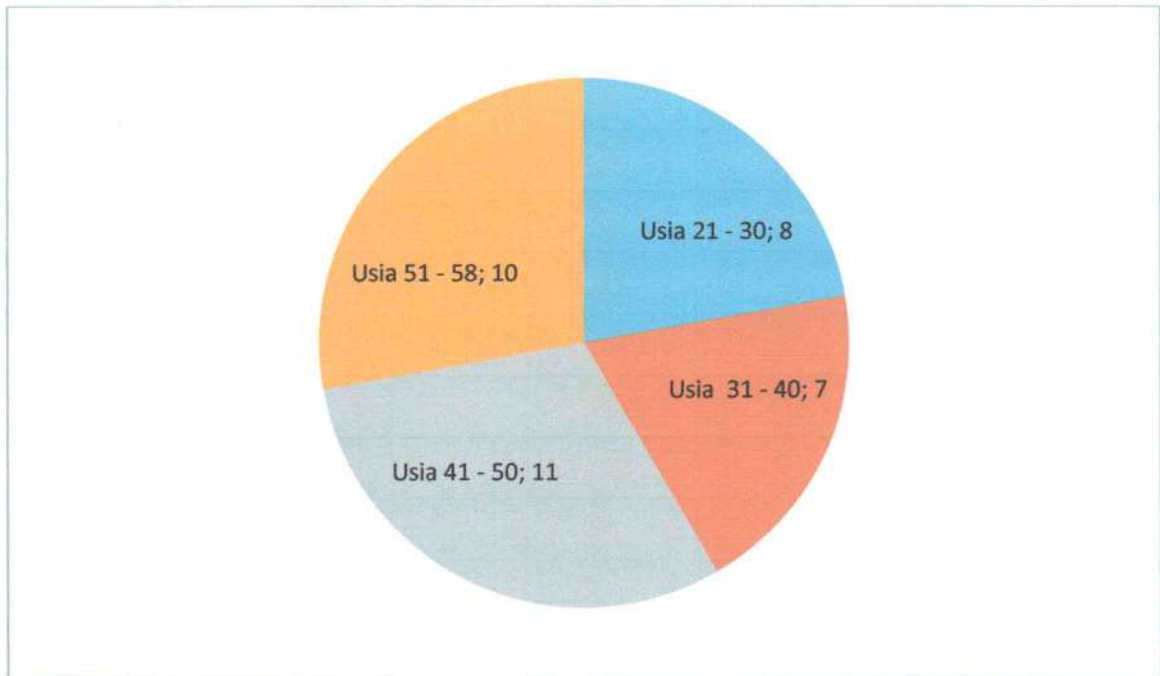


**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

30,56 % bahwa perlu adanya pegawai baru dengan umur produktif serta tenaga ahli dalam pelayanan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kinerja serta realisasi target kinerja yang telah ditetapkan.

Gambar 2.2

Persentase Berdasarkan Umur



Sumber : Kecamatan Balongbendo 31 Desember 2022

Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Balongbendo juga didukung dengan adanya tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.3

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	TOTAL	PERSENTASE
S2	2	5,56
S1	4	11,11
D3	4	11,11
SMA	24	66,67
SMP	2	5,55
SD	0	0,00
TOTAL	36	100,00

Sumber : Kecamatan Balongbendo 31 Desember 2022

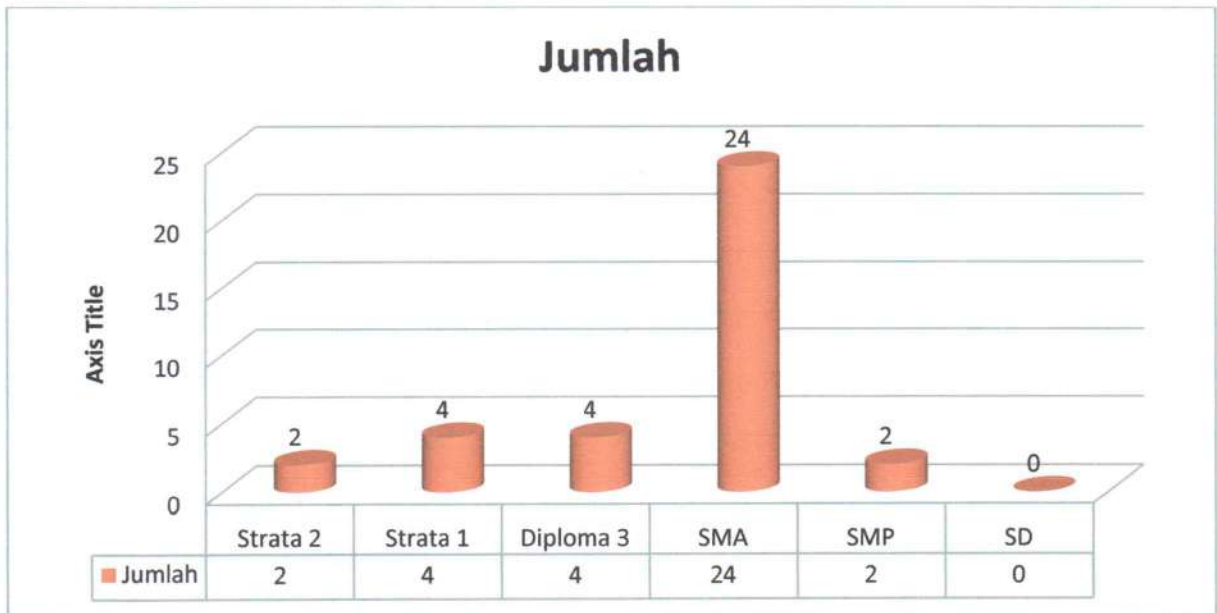


RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Berdasarkan tabel diatas bahwa terdapat tingkat pendidikan di Balongbendo yaitu SMP sebanyak 0 orang, SMA sebanyak 24 orang, D3 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 4 orang, S2 sebanyak 2 orang. Dengan tingkat pendidikan terbanyak yaitu SMA dengan persentase 66,67 %. Keterangan persentase sebagai berikut:

Gambar 2.3

Persentase Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Kecamatan Balongbendo 31 Desember 2022

Tingkat Pendidikan juga dipengaruhi dengan Eselon dan Golongan yang ada di Kecamatan Balongbendo sebagai berikut:

Tabel 2.4

Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	TOTAL
IV A	2
III D	2
III C	0
III B	0
III A	2
II D	13
II C	3
II B	0
TOTAL	23

Sumber : Kecamatan Balongbendo 31 Desember 2022



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

Gambar 2.5

Berdasarkan Eselon

ESELON	TOTAL
III A	1
III B	1
IV A	1
IV B	1

Sumber : Kecamatan Balongbendo 31 Desember 2022

Berdasarkan analisis beban kerja Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Jumlah total kebutuhan pegawai Kecamatan sebanyak 47 orang, eksisting saat ini telah tersedia sebanyak 40 pegawai. Sehingga kebutuhan pegawai pada Kecamatan Balongbendo masih kurang 7 orang yang dapat mengisi kekosongan tugas yang ada pada Kecamatan Balongbendo baik berdasarkan kebutuhan Jabatan, tingkat pendidikan maupun kebutuhan jumlah pegawai ASN maupun Non ASN. Adapun tabel data kebutuhan Pegawai sebagai berikut:

Tabel 2.6

Eksisting Kebutuhan Pegawai Kecamatan Balongbendo



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Gubernur Suryo No.1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Telepon. (031) 8921946,8921960,8921853 Faks. (031) 8941145
Email : setda@sidoariokab.go.id Website : www.sidoariokab.go.id

**BERITA ACARA
ASISTENSI ANJAB ABK PADA KECAMATAN
KECAMATAN BALONGBENDO**

Pada hari ini Selasa tanggal 7 Juni 2022, telah dilakukan asistensi Anjab ABK pada Kecamatan BALONGBENDO diperoleh data sebagai berikut :

**PETA JABATAN
KECAMATAN BALONGBENDO**

Jabatan	Kebutuhan	PNS	NON PNS	Selisih
Camat 1 # 19790141967111001 - ACHMAD HARAH JABRI (PNS)	1	1	0	0
Sekretaris 1 # 19790141967111001 - LILY NURULHASRI (PNS)	1	1	0	0
Kasubbag Umum dan Kepegawaian 1	1	0	0	-1
Pengelola Data (Pelayanan) 1 # 19790270200902101 FARRIS ANHAD (PNS)	3	3	0	0
# 19790270200902101 SANTOS SANDRIFALDI (PNS)				0
# 19790270200902101 MOHAMMAD ROFI (PNS)				0
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana 1 # 3515104205920001 - DIANA DEWI RATNA PANJAWI (NON PNS)	1	0	1	0
Pengadministrasi Umum 1 # 19790141967111001 - DEWI KUSNATI (PNS)	1	1	0	0
Pranata Pasukan Pengamanan Dalam 1 # 19790141967111001 - MUSTIKA HUSNI	7	3	2	-2
# 19790141967111001 - FANI WISNIDI (PNS)				0
				0



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

# 3515121404740001 - CHOIRUL ANAM (NON PNS)				0
# 3515086004920005 - IKA PRATINI APRILLINDA (NON PNS)				0
Pramu Kebersihan	2	0	2	0
# 3515125709750003 - SHI UTAMI (NON PNS)				0
# 3515122109680002 - SUPRIBADI (NON PNS)				0
Pengemudi	1	0	0	-1
Pranata Komputer Terampil	1	1	0	0
# 3515121019037010 - ERIZALDI DA NIKA (PNS)				0
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1	1	0	0
# 3515121019037010 - ERIZALDI DA NIKA (PNS)				0
Pengelola Bahan Perencanaan	1	1	0	0
# 3515121019037010 - ERIZALDI DA NIKA (PNS)				0
Pengelola Gaji	1	1	0	0
# 3515121019037010 - ERIZALDI DA NIKA (PNS)				0
Pengelola Keuangan	1	1	0	0
# 3515121019037010 - ERIZALDI DA NIKA (PNS)				0
Kasi Pemerintahan	1	0	0	-1
Pengelola Administrasi Pemerintahan	2	2	0	0
# 3515121019037010 - ERIZALDI DA NIKA (PNS)				0
# 3515121019037010 - ERIZALDI DA NIKA (PNS)				0
Kasi Pembangunan	1	1	0	0
# 3515121019037010 - ERIZALDI DA NIKA (PNS)				0
Pengelola Data/Teknisi Pemetaan dan Penggambaran	2	2	0	0
# 3515121019037010 - ERIZALDI DA NIKA (PNS)				0
# 3515121019037010 - ERIZALDI DA NIKA (PNS)				0



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

Pramu Kebersihan (Pengangkut Sampah)	3	0	2	-1
# 3515120508000001 - ADI PRAMUDIAH HENDRAWAN (NON PNS)				0
# 3515122802990001 - EDO FERDIANTO (NON PNS)				0
Pengemudi R3	1	0	1	0
# 3515122405860001 - IWAN PRASTYO ROMADONI (NON PNS)				0
Pengemudi Mini Truk	1	0	1	0
# 3515120904780004 - SATRIA WAYAH SAPUTRA AJI (NON PNS)				0
Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	1	0	0
# 19650421198031011 - R. BAMPANG HERY POERHANTO (PNS)				0
Pengelola Keamanan dan Ketertiban	1	1	0	0
# 197402112010011002 - SUMINTO (PNS)				0
Petugas Keamanan / (Satpol PP)	7	2	5	0
# 19621021198031001 - MOCHAMMAD ANDRUL NAIM (PNS)				0
# 196910192010011011 - PENNY SUHANTORO (PNS)				0
# 3515152603860001 - MOCH. CHOIRUN NASIR (NON PNS)				0
# 3515121709930001 - ALDI SLAMET FIRMANO (NON PNS)				0
# 3515120607900001 - ANANG WIDIANTO (NON PNS)				0
# 3515131105920004 - TERY SISWANTO (NON PNS)				0
# 3515120507910001 - DITYA ANTARTIKA (NON PNS)				0
Kasi Perekonomian	1	1	0	0
# 196410011992011001 - WASIS (PNS)				0
Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	1	1	0	0
# 1969052019122017 HINDRI HINDRI (PNS)				0
Kasi Kesejahteraan Sosial	1	0	0	-1
Pengelola Kesejahteraan Sosial	1	1	0	0



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

				0
JUMLAH	47	26	14	-7

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tim Kecamatan BALONGBENDO

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	LENNY NURMALASARI	
2.	MOHAMMAD ROFII	
3.	ELIZABETH RAHAYU	

Tim Anjab ABK Kabupaten Sidoarjo

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	ARIF MULYONO, S.STP. M.HP.	
2.	FARIDA PUSPITASARI, S.Kon	
3.	KUSMANTO, S.Sos, MA	
4.	ACHMAD RIZAL FAUZI, SH	
5.	RARA AMELIA	
6.	M. JAUHARI	

Sumber : Kecamatan Balongbendo 31 Desember 2022

2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung kelancaran tugas dan fungsi dari Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo antara lain:

Tabel 2.7
Peralatan dan Mesin

NO.	SARANA	JUMLAH	SATUAN	STATUS
1	Kendaraan Roda 2	9	UNIT	BAIK
2	Kendaraan Roda 4	3	UNIT	BAIK
3	Patroli	1	UNIT	BAIK
4	Ac	21	UNIT	BAIK
5	Acces Point	2	UNIT	BAIK
6	Braket Standing	1	UNIT	BAIK
7	Camera	3	UNIT	BAIK
8	Card Reader Ktp-EI	2	UNIT	BAIK
9	Cctv	1	SET	BAIK
10	Facsimile	1	UNIT	BAIK
11	Filing Cabinet	13	UNIT	BAIK
12	Gergaji Chain Saw	2	UNIT	BAIK
13	Handy Cam	2	UNIT	BAIK
14	Hardisk External	1	UNIT	BAIK
15	Hepa Filter	2	UNIT	BAIK
16	Jam Bandul	1	UNIT	BAIK



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

17	Kaca Hias	2	UNIT	BAIK
18	Karpet	2	UNIT	BAIK
19	Kipas Angin	4	UNIT	BAIK
20	Koper Ktp-El	1	UNIT	BAIK
21	Korden	1	UNIT	BAIK
22	Kotak Surat	1	UNIT	BAIK
23	Kursi Kerja Eselon Iii	1	UNIT	BAIK
24	Kursi Kerja Eselon Iv	6	UNIT	BAIK
25	Kursi Kerja Non Struktural	61	UNIT	BAIK
26	Kursi Rapat	65	UNIT	BAIK
27	Kursi Tamu	6	UNIT	BAIK
28	Kursi Tunggu	10	UNIT	BAIK
29	Lambang Garuda	3	UNIT	BAIK
30	Laptop	4	UNIT	BAIK
31	Layar Proyektor	2	UNIT	BAIK
32	Lemari Besi	3	UNIT	BAIK
33	Lemari Es	4	UNIT	BAIK
34	Lemari Kaca	26	UNIT	BAIK
35	Lemari Katalog	1	UNIT	BAIK
36	Lemari Kayu	7	UNIT	BAIK
37	Lemari Plastik	1	UNIT	BAIK
38	Meja Kerja	5	UNIT	BAIK
39	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	UNIT	BAIK
40	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7	UNIT	BAIK
41	Meja Komputer	2	UNIT	BAIK
42	Meja Panjang	10	UNIT	BAIK
43	Meja Podium	2	UNIT	BAIK
44	Meja Rapat	1	UNIT	BAIK
45	Mesin Absen (Time Recorder)	3	UNIT	BAIK
46	Mesin Antrian	1	UNIT	BAIK
47	Mesin Cuci kendaraan/ Car Washer	1	UNIT	BAIK
48	Mesin Pemotong Rumput	2	UNIT	BAIK
49	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	UNIT	BAIK
50	Microphone Cable	4	UNIT	BAIK
51	Microphone/Wireless MIC	1	UNIT	BAIK
52	Mixer Audio	1	UNIT	BAIK
53	Neon Box	1	UNIT	BAIK
54	Net Book	4	UNIT	BAIK
55	Note Book	2	UNIT	BAIK
56	P.C Unit	30	UNIT	BAIK
57	Papan Pengumuman	1	UNIT	BAIK
58	Papan Visual/Papan Nama	1	UNIT	BAIK
59	Pemotong Kertas	1	UNIT	BAIK



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

60	PENGHANCUR KERTAS	1	UNIT	BAIK
61	PERALATAN AUDIO VISUAL	2	UNIT	BAIK
62	Pompa Air	2	UNIT	BAIK
63	PRINTER	41	UNIT	BAIK
64	Professional Sound System	1	UNIT	BAIK
65	PROYEKTOR	2	UNIT	BAIK
66	Rak Besi	7	UNIT	BAIK
67	Rak Kayu	3	UNIT	BAIK
68	RAK KORAN	1	UNIT	BAIK
69	Rol Meter	1	UNIT	BAIK
70	ROUTER	8	UNIT	BAIK
71	SCANNER	13	UNIT	BAIK
72	Server	3	UNIT	BAIK
73	SOFA	4	UNIT	BAIK
74	STEMPER	2	UNIT	BAIK
75	Switch	3	UNIT	BAIK
76	Tangga Aluminium	1	UNIT	BAIK
77	Televisi	9	UNIT	BAIK
78	Tempat Tidur Besi	1	UNIT	BAIK
79	Timbangan Bbi Kapasitas 100 Kg	1	UNIT	BAIK
80	Tripod Camera	2	UNIT	BAIK
81	UPS	8	UNIT	BAIK
82	Vertikal Blind	1	UNIT	BAIK
83	WEB CAM	1	UNIT	BAIK
84	Wireless Amplifier	1	UNIT	BAIK
		478		

Sumber : Kecamatan Balongbendo 31 Desember 2022

Berdasarkan tabel data diatas dapat disampaikan bahwa Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Balongbendo masih berfungsi dengan Baik dan dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas, namun jumlah perlu dilakukan penambahan.

2.3 KINERJA PELAYANAN PD

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, Standar dalam pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Dalam standar pelayanan ini juga terdapat baku mutu pelayanan. Adapun mutu merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan publik atau masyarakat di lingkungan Kecamatan Balongbendo.

Pada proses ini, Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo diukur dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi pada tiap tahunnya. Tingkat capaian kinerja diukur menggunakan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan pencapaian kinerja Kecamatan Balongbendo 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut :



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

Tabel 2.8
Hasil Kinerja Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2021

No	Indikator Kinerja Kecamatan Balongbendo	Target Renstra OPD pada tahun					Realisasi Capaian pada tahun					Rasio Capaian pada tahun-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan	80	86	86,50	81	81,50	84,50	79,79	80,19	85,10	88,05	105,63	92,78	92,71	105,06	108,04
2	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Dilaksanakan Dengan Baik	N/A	N/A	80	86,40	84	N/A	N/A	75	100	90	N/A	N/A	93,75	115,74	107,14
	Persentase Desa dengan tata Kelola Administrasi Pemerintahan kategori baik	N/A	N/A	N/A	80	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	125	N/A
	Persentase Desa Maju di Kecamatan	N/A	N/A	0	10	10	N/A	N/A	0	10	10	N/A	N/A	0	100	100



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

Uraian Formulasi IKU (Indikator Kinerja Utama) Perangkat Daerah

A Indikator Kinerja Tujuan :

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

❖ Cara Pengukuran :

- a. Nilai SKM diperoleh secara otomatis dari laman <http://ikm.sidoarjokab.go.id/>. Dengan range penilaian sebagai berikut
 - a) 25,00 – 64,99 (D) = Tidak baik
 - b) 65,00 – 76,60 (C) = Kurang baik
 - c) 76,61 – 88,30 (B) = Baik
 - d) 88,31 – 100,00 (A) = Sangat baik

❖ Definisi Operasional :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- b. Pemohon / penerima layanan mengisi kuesioner melalui website <http://ikm.sidoarjokab.go.id/>. Nilai akan otomatis generated by system.

B Indikator Kinerja Sasaran :

Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemmerintahan kecamatan

1. Nilai SKM

❖ Cara pengukuran :

- a. Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam satu tahun.



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

2. Nilai SAKIP

❖ Cara Pengukuran :

a. Nilai diberikan oleh inspektorat dengan range sebagai berikut :

- a) AA dengan hasil penilaian 90-100
- b) A untuk hasil nilai 80-90.
- c) BB untuk hasil nilai 70-80
- d) B untuk hasil nilai 60-70
- e) CC untuk hasil nilai 50-60
- f) C untuk hasil nilai 30-50
- g) D dengan hasil nilai 0-30

❖ Definisi Operasional :

- a. Penilaian berdasarkan Peraturan Bupati nomor 082 tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PeraJngkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- b. Mengisi LKE dari Inspektorat

3. Nilai RB

❖ Cara Pengukuran :

- a. Untuk OPD, Yang dinilai hanya komponen pengungkit dari sisi pemenuhan dan reform II-23

❖ Definisi Operasional :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- b. Mengisi LKE dari inspektorat



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

4. Nilai IPP

❖ Cara Pengukuran :

a. Indeks penilaian sebagai berikut

- a) 0 – 1,00 F Gagal
- b) 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk
- c) 1,51 – 2,00 D Buruk
- d) 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan)
- e) 2,51 – 3,00 C Cukup
- f) 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan Catatan)
- g) 3,51 – 4,00 B Baik
- h) 4,01 – 4,50 A- Sangat Baik
- i) 4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima

❖ Definisi Operasional :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017
Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
- b. Paparan di depan tim penilai kinerja pelayanan publik

5. Persentase Serapan Anggaran

❖ Cara Pengukuran :

$\% \text{ penyerapan} = \frac{\text{Total Realisasi}}{\text{Total Anggaran}} \times 100\%$

❖ Definisi Operasional :

Prosentase penyerapan anggaran dilihat dari laporan realisasi anggaran pada aplikasi SIKSDA siksda.sidoarjokab.go.id



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

Indikator Kinerja Sasaran :

Sasaran : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

1. Persentase permasalahan trantibum yang diselesaikan

❖ Cara pengukuran :

- a. Jumlah permasalahan trantibum yang difasilitasi dalam satu tahun/jumlah permasalahan trantibum yang ditindaklanjuti dalam satu tahun x 100%

❖ Definisi Operasional :

- a. Penilaian berdasarkan Peraturan Bupati nomor 082 tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PeraJngkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- b. Mengisi LKE dari Inspektorat



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD

Berikut merupakan penjabaran kinerja dari masing-masing indikator:

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Nilai SKM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan demikian juga tahun 2017 ke tahun 2018. Sedangkan tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan.

2. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Dilaksanakan Dengan Baik

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang di delegasikan ke Kecamatan Balongbendo bahwa dalam kategori berhasil. Hal ini ditandai dengan realisasi telah mencapai lebih dari 100% pada tahun 2019 hingga 2020.

3. Persentase Desa Maju di Kecamatan

Pada Tahun 2020 capaian rasio kinerja 100% hal ini pada kategori sangat berhasil. Tetapi masih kurangnya respon dan antusias dari perangkat desa untuk mengisi data terkait IDM dan minim pembinaan secara intensif terhadap aparatur desa terkait pengisian data IDM dikarenakan tidak ada anggaran.



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah	10.000.000	10.000.000	10.000.000	12.000.000	8.000.000	11.991.584	10.251.178	12.772.595	12.680.091	8.006.082	119,92 %	102,05 %	127,73 %	105,67 %	100,08 %	10.000.000	11.131.106
Belanja Daerah	5.480.137.706,28	4.438.178.196,78	4.502.092.221,00	5.551.424.812,00	5.760.990.248,00	5.169.000.735,00	3.581.987.102,00	4.151.964.423,00	5.152.790.367,00	5.118.838.282,00	94,32 %	80,71 %	92,22 %	92,82 %	88,85 %	5.146.564.636,81	4.634.916.181,80



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Berdasarkan Tabel 2.9 diketahui bahwa rasio antara realisasi penyerapan anggaran total dan anggaran total sudah cukup baik karena penyerapan anggaran selama tahun 2016-2021 pada rasio capaian melebihi 86% akan tetapi masih kurang maksimal karena kurang dari 100 %. Selain itu bila dibandingkan dengan matriks capaian kinerja pelayanan dapat disimpulkan bahwa terserapnya anggaran diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD

Pada sub bab ini akan diuraikan tantangan dan peluang yang didapatkan berdasarkan telaah dokumen Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, RTRW dan KLHS.

2.4.1 Hasil Analisis terhadap Dokumen Renstra K/L

Perumusan tantangan dan peluang yang pertama berdasarkan telaah terhadap sasaran dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sasaran renstra kementerian yang sinergi dengan capaian indikator kinerja Kecamatan Balongbendo periode sebelumnya ditunjukkan pada tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2.10
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Kecamatan Balongbendo
terhadap Sasaran Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra	Sasaran pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024	Sasaran pada Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	108,04	- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas - Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan untuk semua keperluan	- Berkembangnya status pembangunan desa
2	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Balongbendo Dilaksanakan Dengan Baik	107,14		



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

3	Persentase Desa Maju di Kecamatan Balongbendo	100,00		
---	---	--------	--	--

Implikasi sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 terhadap pelayanan Kecamatan Balongbendo antara lain:

a) Tantangan:

1. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dari berbagai kepentingan.
2. Tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat.
3. Tingkat kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan yang masih kurang.

b) Peluang:

1. Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Dukungan anggaran dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang lebih besar.
3. Perkembangan teknologi informasi yang semakin baik (banyaknya aplikasi yang dibuat oleh SKPD dalam peningkatan pelayanan).

2.4.2 Hasil Analisis terhadap Dokumen Renstra PD Provinsi

Tidak dilakukan analisa dikarenakan tidak berhubungan baik secara koordinasi maupun tidak langsung antara PD Kecamatan Balongbendo dengan PD Provinsi Jawa Timur.

2.4.3 Hasil Analisis terhadap Telaahan Dokumen RTRW

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 mempertimbangkan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029. Program pemanfaatan dan pengembangan tata ruang dalam Renstra Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 disesuaikan dengan indikasi program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 di lima tahun ketiga. Berbagai indikasi program RTRW Kabupaten Sidoarjo lima tahun ketiga yang tercakup dalam Rencana Strategis Kecamatan Balongbendo.



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Urusan penataan ruang dilaksanakan untuk menjamin adanya pemanfaatan lahan yang optimal di masyarakat. Oleh karena itu penyusunan tata ruang wilayah harus dilakukan secara detail dan cermat sehingga setiap wilayah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi daerah. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan: a) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. b) Keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. c) Perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 Pasal 21 ayat 2 menjelaskan Kawasan Wilayah yang berbunyi : Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Sidoarjo meliputi wilayah yang ada di Kecamatan Waru, Sedati, Buduran, Gedangan, Sidoarjo, Candi, Tanggulangin, Jabon, Taman, Krian, **Balongbendo**, Krembung, Tarik, Prambon, Wonoayu, Sukodono, Porong, dan Tulangan.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 juga mempertimbangkan Rencana Tata Ruang yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut bahwa Wilayah Perencanaan Perkotaan Balongbendo, meliputi :

- a. Desa Balongbendo;
- b. Desa Singkalan;
- c. Desa Kedungsukodani;
- d. Desa Sumokembangsri;
- e. Desa Seduri;
- f. Desa Wonokupang;
- g. Desa Waruberon;
- h. Desa Bakalanwringinpitu;
- i. Desa Ganggangkepuhsari;
- j. Desa Suwaluh;
- k. Desa Watesari;



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

- l. Desa Seketi;
- m. Desa Kemangsen;
- n. Desa Jabaran;
- o. Desa Jeruk Legi;
- p. Desa Penambangan;
- q. Desa Wonokarang;
- r. Desa Bakungpringgodani; dan
- s. Desa Bogempinggir

Sedangkan batas-batas Administrasi Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Balongbendo adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Wiringinanom Kabupaten Gresik;
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tarik dan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Wiringinanom Kabupaten Gresik; dan
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Sebagai penjabaran dari perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah, Renstra Kecamatan Balongbendo berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026, sebagaimana dalam penyusunannya RPJMD juga mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah Jawa Timur dan kabupaten/kota lain yang berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Pasuruan dan Mojokerto. Dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam arahan sistim perkotaan Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian strategis dalam unsur Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Beberapa rencana tata ruang yang menjadi pertimbangan antara lain:

- a. Pengembangan Kasawan Agropolitas di Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Malang dan Bangkalan;
- b. Pengembangan kawasan industri dan perdagangan di perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto.

Adapun Faktor-faktor penghambat dan pendorong pada Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Faktor Penghambat :

- 1. Terbatasnya SDM Aparatur yang tersedia dalam melayani dan melaksanakan tupoksi;



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

2. Kurangnya akurasi data sebagai database perencanaan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan perekonomian, kesejahteraan Sosial dan pembangunan;
3. Kurang tersedianya juknis dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari bupati kepada camat;
4. Rendahnya kesadaran sosial dan masih banyaknya pelanggaran;
5. Perbedaan persepsi antara bupati kepada camat maupun desa dalam pelimpahan kewenangan;
6. Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam penyelenggara kegiatan-kegiatan yang masih belum optimal;
7. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam penunjang pelayanan yang diberikan;
8. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan kegiatan.

Faktor Pendorong :

1. Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan yang diberikan;
2. Perkembangan teknologi informasi;
3. Meningkatnya pengetahuan SDM Aparatur Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah desa;
4. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Desa yang mendapatkan pembinaan dalam menyusun APBDes dan LPPD sesuai Juknis.

2.4.4 Hasil Analisis terhadap Telaahan Dokumen KLHS

Pada program kegiatan dan sub kegiatan pada kecamatan tidak termasuk dalam muatan KLHS, namun kedepan program kegiatan sub kegiatan seluruh Kecamatan berkonsep berorientasi keberlanjutan dan lingkungan.

2.5 KERJASAMA DAERAH

Tidak dilakukan analisa dikarenakan kerjasama yang dilakukan oleh PD melalui Bapak Bupati Sidoarjo Sidoarjo.




RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

2.6 KETERHUBUNGAN DAN KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH DALAM DOKUMEN RENSTRA PD

2.6.1 Data Pendukung Indikator Kinerja

1. SOP Review Perubahan Renstra

	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	No. Dok.	065/ 58 /438.7.11/2023
		No. Rev.	01
	REVIU PERUBAHAN RENSTRA	Tanggal	28 Maret 2023
		Halaman	1 dari 7 halaman



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATAN BALONGBENDO

REVIU PERUBAHAN RENSTRA

No. Dokumen : 065/ 58 /438.7.11/2023
Revisi : 01
Tanggal Terbit : 28 Maret 2023
Referensi : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Ditetapkan di :
CAMAT BALONGBENDO


ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM
Pembina
NIP. 19790114 199711 1 001



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	No. Dok.	065/CS/438.7.11/2023
		No. Rev.	01
	REVIU PERUBAHAN RENSTRA	Tanggal	28 Maret 2023
		Halaman	2 dari 7 halaman

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan SOP Reviu Perubahan Renstra adalah untuk memberikan petunjuk atau pedoman bagi tim penyusun dokumen perencanaan dalam melakukan Perubahan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) sehingga dokumen tersusun sesuai dengan kaidah penyusunan yang ditetapkan, dan relevan dengan alasan keberadaan Kecamatan Balongbendo.

2. RUANG LINGKUP

SOP Reviu Perubahan Renstra merupakan implementasi SAKIP pada Kecamatan Balongbendo, mulai dari tahap penentuan isu-isu strategis, perumusan *core business* OPD, analisa SWOT, hingga kesimpulan akhir.

3. DEFINISI

Perubahan Renstra adalah proses melakukan evaluasi atas dokumen Renstra yang telah disusun sebelumnya, dimana evaluasi yang dilakukan meliputi :

1. Ukuran keberhasilan yang tertuang dalam Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
2. Indikator keberhasilan kinerja, baik untuk Tujuan, Sasaran, Program maupun Kegiatan;
3. Target yang telah ditetapkan sebelumnya
4. Capaian kinerja tahun berjalan yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja/ LAKIP

Diharapkan Perubahan akan menghasilkan kualitas dokumen RENSTRA lebih baik dari sebelumnya.



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	No. Dok.	065/ t ^S /438.7.11/2023
		No. Rev.	01
	REVIU PERUBAHAN RENSTRA	Tanggal	28 Maret 2023
		Halaman	3 dari 7 halaman

4. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam SOP Reviu Perubahan Renstra antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. TANGGUNGJAWAB

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra adalah sebagai berikut :

5.1 Ketua

Ketua adalah jabatan yang diperankan oleh Camat Balongbendo dengan tugas dan kewajiban antara lain :

- a. Memberikan pengarahan kepada tim Perubahan Renstra secara langsung maupun berjenjang berupa kebijakan dan peraturan daerah berkaitan dengan implementasi SAKIP dan informasi-informasi lain yang dianggap perlu.
- b. Meminta keterangan/informasi dari tim Perubahan Renstra baik secara langsung maupun berjenjang tentang perkembangan pelaksanaan Perubahan Renstra
- c. Menandatangani laporan hasil Perubahan Renstra yang diajukan setelah melalui proses analisa dan pembahasan secara berjenjang dan menyampaikan laporan hasil Perubahan Renstra.



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	No. Dok.	065/ 18 /438.7.11/2023
		No. Rev.	01
	REVIU PERUBAHAN RENSTRA	Tanggal	28 Maret 2023
		Halaman	4 dari 7 halaman

5.2 Sekretaris

Sekretaris adalah jabatan yang diperankan oleh Sekretaris Kecamatan Balongbendo dengan tugas dan kewajiban antara lain :

- Memastikan pemberitahuan akan dilaksanakan Perubahan telah terkirim kepada masing-masing pelaksana kegiatan;
- Menyiapkan dan mengkoordinasikan pemanfaatan sarana-prasarana penunjang untuk melaksanakan Perubahan Renstra antara lain sarana mobilisasi, alat-alat ukur, ATK dll;
- Membantu ketua untuk memperoleh informasi awal yang diperlukan dari tim Perubahan Renstra;
- Membantu ketua untuk menyampaikan informasi yang diperlukan kepada tim Perubahan Renstra;
- Membantu penanggungjawab untuk melakukan Perubahan atas laporan hasil Perubahan Renstra;
- Memverifikasi laporan hasil Perubahan Renstra;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua dalam rangka kelancaran Perubahan Renstra.

5.3 Anggota

Anggota adalah jabatan yang diperankan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan tugas dan kewajiban antara lain :

- Melaksanakan kegiatan Perubahan Renstra yang dihadiri oleh seluruh pelaksana kegiatan
- Memberikan pertimbangan yang diperlukan atas permasalahan yang dijumpai pada Perubahan Renstra, dengan memberikan penjelasan teknis.
- Melakukan komunikasi dengan ketua atas permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan Perubahan Renstra, untuk memastikan proses Perubahan Renstra berjalan dengan lancar.
- Melakukan Perubahan dan validasi atas usulan perubahan dari masing-masing pelaksana kegiatan, dengan menilai kecukupan relevansinya dengan kaidah penyusunan yang ada.
- Selanjutnya menyampaikan keputusan dimaksud kepada Camat Balongbendo.



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	No. Dok.	065/ 58 /438.7.11/2023
		No. Rev.	01
	REVIU PERUBAHAN RENSTRA	Tanggal	29 Maret 2023
		Halaman	5 dari 7 halaman

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua dalam rangka kelancaran Perubahan Renstra.

5 URAIAN PROSEDUR

1. Camat Balongbendo memerintahkan seluruh pelaksana kegiatan untuk melakukan Perubahan kerjanya.
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sekretaris Kecamatan Balongbendo menghimpun usulan / konsep perubahan Renstra.
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melaporkan hasil usulan perubahan Renstra kepada Sekretaris Kecamatan Balongbendo.
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mengadakan acara pembahasan usulan perubahan Renstra.
5. Usulan perubahan Renstra dibahas bersama dengan dipimpin oleh Camat Balongbendo.
6. Setelah pembahasan final dan di setujui bersama, laporan diberikan ke Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk diagenda dan dimintakan tanda tangan
7. Laporan hasil Perubahan Renstra yang sudah ditanda tangani siap untuk dipublikasikan

6. ALUR SOP



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	No. Dok	065/ 38 /438.7.11/2023
		No. Rev	01
	REVIU PERUBAHAN RENSTRA	Tanggal	20 Maret 2023
		Halaman	6 dan 7 halaman

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku		
		Camat Balongbendo	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris Kecamatan Balongbendo	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Memerintahkan untuk Perubahan kerjanya	□				Capaian Kinerja	1 Hari	Usulan
2	Membuat draft konsep usulan perubahan		□			Draft	3 Hari	Format
3	Menghimpun usulan / konsep perubahan			□		Draft	1 hari	Usulan Perubahan
4	Mengadakan Rapat pembahasan Perubahan Renstra		□			Tim	1 hari	Rapat
5	Analisa dan Pembahasan usulan perubahan	□				Usulan perubahan	3 Hari	Laporan Perubahan Renstra
6	Paraf persetujuan hasil Perubahan				□	Laporan Perubahan Renstra	3 hari	Berita Acara Perubahan
7	Publikasi hasil reviu				□	Berita Acara Perubahan	1 hari	Dokumentasi



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	No. Dok.	065/ 58 /438.7.11/2023
		No. Rev.	01
	REVIU PERUBAHAN RENSTRA	Tanggal	28 Maret 2023
		Halaman	7 dari 7 halaman

6 CATATAN MUTU

Dokumen pendukung yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini :

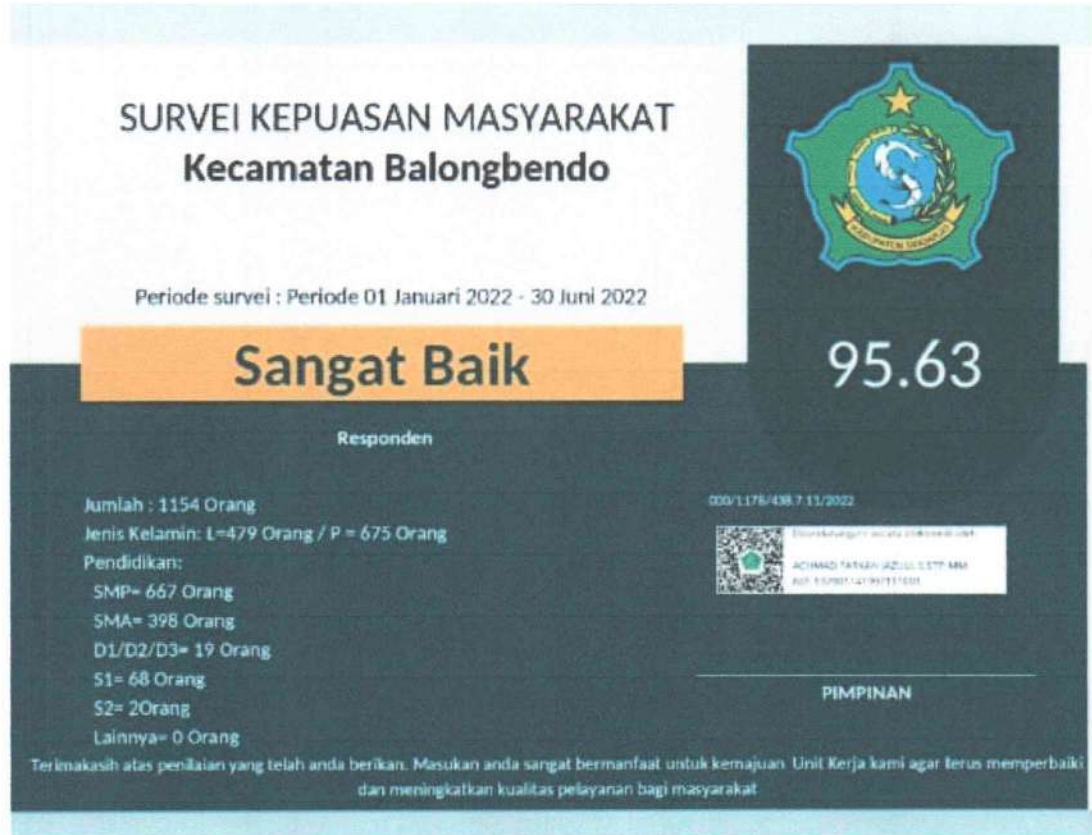
- a. Data Pendukung Kualitas IKU
- b. Laporan Kinerja OPD
- c. Laporan Kinerja Individu
- d. Matriks Renstra 2021 - 2026
- e. DPPA Tahun 2021
- f. DPPA Tahun 2022
- g. Rancangan Akhir Renja Tahun 2023



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

2. Data Pendukung Kualitas IKU

a. Nilai SKM



b. Nilai RB



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Untung Suropati No. 10
Telp. (031) 8948163; Fax. (031) 99010187
SIDOARJO - 61218
E-mail : inspektorat@sidoarjakab.go.id Website : inspektoratdaerah.sidoarjakab.go.id

Sidoarjo, 7 Juli 2022

Nomor : 700/S¹⁰/438.4/2022
Sifat : Rahasia
Lampiran: Satu Bendel
Hal : Laporan Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) Tahun 2022

Kepada
Yth. Camat Balongbendo
di
BALONGBENDO

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, telah dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, sesuai dengan SPT No.700/1232/438 . 4/2022 tanggal 01 Juni 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 24 Juni 2022 (17 hari kerja), untuk melakukan evaluasi PMPRB pada 48 OPD Kabupaten Sidoarjo.

PMPRB unit/OPD dari Lembar Kerja Evaluasi (LKE) manual (karena Penilaian PMPRB dari Kemenpan RB Tahun 2022 ini menggunakan LKE Manual yang kemudian dikirim melalui link yang diberi oleh Kemenpan RB di bit.ly/SubmitPMPRB2022) dan diperoleh hasil evaluasi 32,38 (data sampai dengan tanggal 12 Juni 2022), dengan rincian uraian sebagai berikut :

	Penilaian	Bobot	Nilai	%
A.	PENGUNGKIT	36,30	32,38	89,20%
I.	PEMENUHAN	14,60	12,15	0,83
	1 MANAJEMEN PERUBAHAN	2,00	1,33	0,67
	2 DEREGULASI KEBUAKAN	1,00	1,00	1,00
	3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	2,00	2,00	1,00
	4 PENATAAN TATALAKSANA	1,00	0,76	0,76
	5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1,40	1,13	0,81
	6 PENGUATAN AKUNTABILITAS	2,50	2,31	0,93
	7 PENGUATAN PENGAWASAN	2,20	1,28	0,58
	8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2,50	2,33	0,93
B.	REFORM	21,70	20,23	0,93
	1 MANAJEMEN PERUBAHAN	3,00	2,77	0,92
	2 DEREGULASI KEBIJAKAN	2,00	2,00	1,00
	3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	1,50	1,50	1,00
	4 PENATAAN TATALAKSANA	3,75	3,25	0,87
	5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	2,00	2,00	1,00
	6 PENGUATAN AKUNTABILITAS	3,75	3,01	0,80
	7 PENGUATAN PENGAWASAN	1,95	1,95	1,00
	8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3,75	3,75	1,00

Dipindai dengan CamScanner




**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

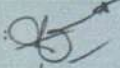





Batas penginputan PMPRB untuk wilayah WIB dilakukan melalui Link bit.ly/SubmitPMPRB2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022.

Demikian untuk menjadikan perhatian. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Pembantu Penanggungjawab


Drs. MADE SUYARTA
Pembina Tk. I
NIP. 19670326 199401 1 003

Evaluator

1. I VERA SIADINA, S.STP. M.SI (Pengendali Teknis) : 
2. VIRANI RAKHMA SARI, SE (Ketua Tim) : 
3. TIMUR KARTIKA SUSANTI, S.Kom (Anggota) : 
4. IKA SAFITRI NINGSIH, S.Si (Anggota) : 
5. DINDA ANDYARTA P. A.Md.Akun (Anggota) : 
6. APRILIA NADINE, A.Md.Ak (Anggota) : 

Penanggungjawab
INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO



Dipindai dengan CamScanner



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

c. Nilai IPP



d. Nilai SAKIP



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



BUPATI SIDOARJO

Sidoarjo, 30 Desember 2022

Nomor : 700/18299/438.4/2022
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Evaluasi atas
Implementasi SAKIP
Kecamatan Balongbendo
Kabupaten Sidoarjo Tahun
2022

Kepada
Yth. Camat Balongbendo
Kabupaten Sidoarjo
di
BALONGBENDO

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah menugaskan tim dengan surat tugas nomor : 700/2751/438.4/2022 tanggal 28 Oktober 2022 untuk melaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di OPD Saudara. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented*)

Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Java Timur
Telp. (031) 8921946, 8941145, Fax. 8946924



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat" untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Adapun hasil penilaian implementasi AKIP di Kecamatan Balongbendo adalah sebagai berikut :

Komponen nilai SAKIP :

	Komponen yang dinilai	2022	
		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,20
b.	Pengukuran Kinerja	30	19,44
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,43
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	79,32
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB


Dari hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo memperoleh nilai **79.32** atau predikat "**BB**". Penilaian tersebut menunjukkan Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen akuntabilitas kinerja dan penilaian risiko yang perlu diperhatikan beserta rekomendasi yang diperlukan sebagai berikut :

A. SIMPULAN HASIL EVALUASI

1. Perencanaan Kinerja

- a. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balongbendo Tahun 2021–2026 telah disusun dan ditetapkan serta dilakukan reviu berkala tahunan 2022 yang dituangkan dalam berita acara tanggal 7 Maret 2022 beserta lampirannya yang menyajikan kondisi sebelum dan sesudah reviu.

The background features a large, faint watermark of the official logo of Kabupaten Sidoarjo. The logo is a shield-shaped emblem with a five-pointed star at the top. Below the star is a circular wreath containing a rice stalk and a cotton plant. At the bottom of the wreath, a banner reads "KABUPATEN SIDOARJO".

BAB III
ISU - ISU STRATEGIS



BAB III ISU-ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN PD

Pada sub-bab Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Balongbendo, akan dianalisa terkait masalah pokok atau masalah makro Kecamatan Balongbendo, Masalah atau penyebab dari timbulnya masalah makro dan akar masalah atau penyebab masalah yang lebih rinci. Masalah pokok, masalah dan akar masalah Kecamatan Balongbendo ditunjukkan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Masih adanya pelaku usaha yang akan mengurus perizinan di Kecamatan Balongbendo tidak mengetahui rencana struktur ruang Kecamatan Balongbendo	Belum adanya informasi terkait rencana struktur pola ruang yang diinformasikan melalui website maupun ruang pelayanan Kecamatan	a. Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah b. Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR c. Belum adanya rencana detail tata ruang untuk Kecamatan Balongbendo
2	Masih adanya potensi Rumah Tinggal 2 lantai luasan maksimal 400m ² yang belum memiliki izin	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan IMB	a. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB b. kurangnya personil/SDM kecamatan untuk melakukan jemput bola atau pengawasan langsung kerumah-rumah
3	Masih adanya potensi pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan usaha	a. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki TDP,SIUPdan kemudahan dalam mengurus TDP,SIUP
4	Banyaknya pertumbuhan angka kelahiran setiap tahunnya	Pelimpahankewenangan Bupati Kepada Camat terkait pencetakan KIA	a. Meningkatnya jumlah pengajuan cetak KIA, kecamatan bekerjasama dengan UPT Dinas pendidikan memfasilitasi kolektif pengajuan cetak KIA untuk menghindari kerumunan pengajuan secara langsung di Ruang Pelayanan Kecamatan



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
			Balongsendo

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi RPJMD yang merupakan visi dari Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan Visi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2016. Adapun visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo adalah **"Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani"**. Sehubungan dengan itu, rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 adalah **"Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan"**. Visi tersebut memiliki unsur yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (growth) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (equality). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
- b. Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi "menjemput Perubahan". Segala sumberdaya pemerintahan dan sumberdaya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna "terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya". Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.
- c. Sidoarjo berkarakter merupakan Unsur penting dari konsep pembangunan People Centered Development atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (value)



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.

- d. Pembangunan Berkelanjutan merupakan Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (sustainable development). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo

Misi merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dijabarkan kedalam 5 misi yaitu dijalankan secara berkesinambungan dengan strategis serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi serta pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pengembangan kemakmuran masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini 5 (Lima) misi tersebut:

Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Misi 2: Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.

Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sektor potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luas khususnya sub sector perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian fiskal daerah.

Misi 3: Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan sosial yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolitan gerbangkertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo.

Misi 4: Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.

Pembangunan berpusat pada manusia (people centered development) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (human resources) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budaya sebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan kearah yang lebih jelas.



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.

Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada value tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib, tentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan			
Tujuan dan Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha			
Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga			
Tujuan Misi 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital serta pelayanan publik berkualitas yang mendukung kemudahan berusaha Sasaran 1: Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka mendukung kemudahan berusaha Tujuan Misi 5: Menguatnya	1. Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah 2. Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR 3. Belum adanya rencana detail tata ruang untuk Kecamatan Balongbendo 4. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB 5. kurangnya	1. Minimalnya informasi yang diberika kecamatan untuk kebutuhan pelaku usaha 2. Belum keseluruhan SDM mengerti tentang SPM bidang PUPR 3. Minimnya kesadaran masyarakat akan kepengurusan IMB 4. Masih kurangnya SDM dalam pengawasan IMB 5. Minimalnya arah Dinas Pemberdayaan Desa pada aparatur desa 6. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus TDP, SIUP 7. Kerap terjadi perselisihan antar	1. Adanya sarana informasi dengan kemudahan akses untuk pelaku usaha 2. Adanya pelatihan pemahaman tentang SPM bidang PUPR 3. Sosialisasi kepada desa dan masyarakat untuk kepentingan pelaporan dan pengurusan IMB 4. Penambahan SDM untuk pengawasan IMB



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan			
Tujuan dan Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)
Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat Sasaran 2: Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	personil/SDM kecamatan untuk melakukan jemput bola atau pengawasan langsung kerumah-rumah 6. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki TDP, SIUP dan kemudahan dalam mengurus TDP, SIUP 7. Meningkatnya jumlah pengajuan cetak KIA, kecamatan bekerjasama dengan UPT Dinas pendidikan memfasilitasi kolektif pengajuan cetak KIA untuk menghindari kerumuman pengajuan secara langsung di Ruang Pelayanan Kecamatan Balongbendo	masyarakat atau desa 8. Kurangnya SDM di Pelayanan	5. Menambah SDM untuk melakukan jemput bola pelayanan TDP & SIUP 6. Pembinaan dan pemberian pemahaman akan pentingnya ketertiban umum antar masyarakat dan desa 7. Menambah SDM di pelayanan



3.3 TELAHAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD PROVINSI

Pada telaahan Renstra K/L menggunakan Renstra Kementerian Dalam Negeri dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ada pada Renstra Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai di masa mendatang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan yaitu sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan Renstra PD Provinsi Jawa Timur tidak dijelaskan dikarenakan PD Kecamatan tidak memiliki hubungan koordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berikut ini adalah penjabaran Renstra Kementerian Dalam Negeri berdasarkan tujuan dan sasarannya

Tabel 3.3

Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Renstra
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

No (1)	Tujuan Strategis (2)	Sasaran Strategis (3)
1	Terwujudnya stabilitas politik dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa	a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah c. Meningkatnya kewaspadaan nasional d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas
2	Peningkatan kapsaitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan untuk semua keperluan e. Meningkatnya tata kelola penyelenggraan kewilayahan
3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan lingkungan Kementerian dalam Negeri	a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri



Tabel 3.4
Telaah Renstra Kementerian

No	Sasaran Strategis Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan untuk semua keperluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah 2. Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR 3. Belum adanya rencana detail tata ruang untuk Kecamatan Balongbendo 4. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB 5. kurangnya personil/SDM kecamatan untuk melakukan jemput bola atau pengawasan langsung kerumah-rumah 6. kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha terkait pentingnya memiliki TDP, SIUPserta kemudahan dalam mengurus TDP, SIUP 7. Meningkatnya jumlah pengajuan cetak KIA, kecamatan bekerjasama dengan UPT Dinas pendidikan memfasilitasi kolektif pengajuan cetak KIA untuk menghindari kerumuman pengajuan secara langsung di Ruang Pelayanan Kecamatan Balongbendo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimalnya informasi yang diberika kecamatan untuk kebutuhan pelaku usaha 2. Belum keseluruhan SDM mengerti tentang SPM bidang PUPR 3. Minimnya kesadaran masyarakat akan kepengurusan IMB 4. Masih kurangnya SDM dalam pengawasan IMB 5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus& TDP, SIUP 6. Kerap terjadi perselisihan antar masyarakat atau desa 7. Masih kurang SDM di Pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sarana informasi dengan kemudahan akses untuk pelaku usaha 2. Adanya pelatihan pemahaman tentang SPM bidang PUPR 3. Sosialisasi kepada desa dan masyarakat untuk kepentingan pelaporan dan pengurusan IMB 4. Penambahan SDM untuk pengawasan IMB dan pengurusan TDP, SIUP 5. Pembinaan dan pemberian pemahaman akan pentingnya ketertiban umum antar masyarakat dan desa 6. Menambah SDMdi pelayanan



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

**3.4 TELAAHAN RANCANGAN TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS**

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029. Telaah terhadap RTRW bertujuan agar pembangunan lima tahun kedepan tidak menyimpang dengan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029, disebutkan bahwa fungsi RTRW kabupaten antara lain:

- a. Sebagai matra ruang dari pembangunan daerah
- b. Sebagai dasar pengaturan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang di daerah
- c. Sebagai alat untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah

Sedangkan tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan:

- a. Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; serta
- c. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penelahaan RTRW dan KLHS haruslah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah tersebut, dalam hal ini perlu dipahami bahwa tugas dan fungsi Kecamatan Balongbendo tidak secara langsung berkaitan dengan urusan dalam RTRW maupun KLHS. Tupoksi Kecamatan Balongbendo lebih mengarah pada fungsi koordinasi dan fasilitasi. Oleh karena itu dalam telaah ini kedudukan Kecamatan Balongbendo hanya sebagai pendukung pelaksanaan RTRW dan KLHS. Sehingga isu yang muncul berdasarkan RTRW maupun KLHS tidak dapat secara langsung terselesaikan melalui program dan kegiatan pada Kecamatan.



Tabel 3.5

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo

No	Rencana Pengembangan Kawasan	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Pemukiman pedesaan maupun perkotaan 2. Perdagangan dan Jasa 3. Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah 2. Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR 3. Belum adanya rencana detail tata ruang untuk Kecamatan Balongbendo 4. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB 5. kurangnya personil/SDM kecamatan untuk melakukan jemput bola atau pengawasan langsung kerumah-rumah 6. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki TDP, SIUP dan kemudahan dalam mengurus TDP, SIUP 7. Meningkatnya jumlah pengajuan cetak KIA, kecamatan bekerjasama dengan UPT Dinas pendidikan memfasilitasi kolektif pengajuan cetak KIA untuk menghindari kerumuman pengajuan secara langsung di Ruang Pelayanan Kecamatan Balongbendo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimalnya informasi yang diberikan kecamatan untuk kebutuhan pelaku usaha 2. Belum keseluruhan SDM mengerti tentang SPM bidang PUPR 3. Minimnya kesadaran masyarakat akan kepengurusan IMB, TDP, SIUP 4. Masih kurangnya SDM dalam pengawasan IMB 5. Minimalnya arah Dinas Pemberdayaan Desa pada aparaturnya desa 6. Kerap terjadi perselisihan antar masyarakat atau desa 7. Kurangnya SDM di pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sarana informasi dengan kemudahan akses untuk pelaku usaha 2. Adanya pelatihan pemahaman tentang SPM bidang PUPR 3. Sosialisasi kepada desa dan masyarakat untuk kepentingan pelaporan dan pengurusan IMB, TDP, SIUP 4. Penambahan SDM untuk pengawasan IMB 5. Kecamatan yang ikut mensupport desa untuk menjadikan desa maju ke desa mandiri 6. Pembinaan dan pemberian pemahaman akan pentingnya ketertiban umum antar masyarakat dan desa 7. Menambah SDM di Pelayanan



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

3.5 PENENTU ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Sidoarjo, Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka isu-isu strategis yang terkait adalah

1. Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah
2. Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR
3. Belum adanya rencana detail tata ruang untuk Kecamatan Balongbendo
4. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB
5. kurangnya personil/SDM kecamatan untuk melakukan jemput bola atau pengawasan langsung kerumah-rumah
6. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki TDP, SIUP dan kemudahan dalam mengurus TDP, SIUP
7. Masih adanya ego antar sektoral dari masing-masing masyarakat akan ketentraman dan ketertiban umum
8. Meningkatnya jumlah pengajuan cetak KIA, kecamatan bekerjasama dengan UPT Dinas pendidikan memfasilitasi kolektif pengajuan cetak KIA untuk menghindari kerumuman pengajuan secara langsung di Ruang Pelayanan Kecamatan Balongbendo

Metode penentu isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dapat dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel dengan contoh sebagai berikut:
 - b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut, dengan mengisi tabel sebagai berikut:



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

Tabel 3.6

Skor Kriteria Penentu Isu-Isu Strategis

Berdasarkan skor kriteria penentu isu strategi telaah ditentukan hasil penilaian isu strategis sebagai berikut:

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap public	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Total		100

Tabel 3.7

Total Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total Skor						Total Skor
		1 (0,20)	2 (0,10)	3 (0,20)	4 (0,10)	5 (0,15)	6 (0,25)	7 (100)
1	Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah	5	5	4	5	4	4	4,40
2	Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR	5	5	5	5	5	5	5,00
3	Belum adanya rencana detail tata ruang untuk Kecamatan Balongbendo	4	4	4	3	3	3	3,50
4	kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait	4	4	4	4	4	3	3,75



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

No	Isu Strategis	Total Skor						Total Skor
		1 (0,20)	2 (0,10)	3 (0,20)	4 (0,10)	5 (0,15)	6 (0,25)	7 (100)
	pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB							
5	kurangnya personil/SDM kecamatan untuk melakukan jemput bola atau pengawasan langsung kerumah-rumah	5	5	5	4	4	5	4,75
6	kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki TDP, SIUP dan kemudahan dalam mengurus TDP, SIUP	4	4	4	4	3	3	3,60
7	Masih adanya ego antar sektoral dari masing-masing masyarakat akan ketentraman dan ketertiban umum	5	5	5	5	4	4	4,60
8	Meningkatnya jumlah pengajuan cetak KIA, kecamatan bekerjasama dengan UPT Dinas pendidikan memfasilitasi kolektif pengajuan cetak KIA untuk menghindari kerumuman pengajuan secara langsung di Ruang Pelayanan Kecamatan Balongbendo	4	4	4	4	3	3	3,60



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

Berdasarkan hasil skoring diatas, diketahui bahwa untuk menjawab isu strategis terkait Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Balongbendo perlu memprioritaskan pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR

The background features a large, faint watermark of the Kabupaten Sidoarjo logo. The logo is a shield-shaped emblem with a five-pointed star at the top. Below the star is a circular wreath containing a rice stalk and a cotton plant. At the bottom of the wreath is a banner with the text "KABUPATEN SIDOARJO".

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PD

Visi RPJMD yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan Visi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2026. Adapun Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo adalah **“Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani”**. Sehubungan dengan itu, maka rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 ini adalah **“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”**. Dalam mewujudkan visi tersebut perlu adanya penjabaran Visi dalam 5 Misi, dijalankan secara berkesinambungan dan strategis serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pengembangan kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri, berikut 5 (Lima) misi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.
2. Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
3. Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.
4. Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.
5. Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga

Untuk mendorong tercapainya Visi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo, maka peran dari Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo terletak pada misi 1 (satu) yakni **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha”**. dan misi 5 (lima) yakni **“ Mewujudkan Masyarakat**



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga “. Untuk menjawab tujuan, indikator tujuan dan sasaran yang tertera pada RPJMD, maka setiap PD wajib menjabarkan melalui tujuan dan sasaran PD. Berikut dirumuskan tujuan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo

“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum”

Selain tujuan PD dirumuskan sasaran dari Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum.



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran pada Misi 1 RPJMD:															
1. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital															
2. Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka mendukung kemudahan berusaha															
Sasaran pada Misi 5 RPJMD:															
1. Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram															
Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan						Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12	13	14
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik (87,15)	Sangat Baik (88,31)	Sangat Baik (89,00)	Sangat Baik (89,50)	Sangat Baik (90,20)	Sangat Baik (91,00)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik (87,15)	Sangat Baik (88,31)	NA	NA	NA	NA
									2. Nilai SAKIP	NA	A (80,01)	A (80,50)	A (81,00)	A (81,50)	A (82,00)
									3. Nilai RB	NA	32,67	33	34	35	36
									4. Nilai IPP	NA	A-(4,10)	A-(4,20)	A-(4,30)	A-(4,40)	A-(4,50)
									5. Presentase Serapan Anggaran	NA	90 %	NA	NA	NA	NA



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

								Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	NA	100 %	NA	NA	NA	NA
									Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	NA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

The background features a large, faint watermark of the official logo of Kabupaten Sidoarjo. The logo is a shield-shaped emblem with a five-pointed star at the top, a central circular motif containing a stylized figure, and a banner at the bottom with the text 'KABUPATEN SIDOARJO'.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah atau perangkat daerah dalam mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap. Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo yang sinergis dengan tugas dan fungsi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan kemudahan Berusaha. Dengan tujuan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha.

Strategi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021- 2026 dapat ditentukan melalui kepentingan peran dari RTRW yaitu Saat ini informasi yang terdapat belum terpublikasi di website resmi Kecamatan Balongbendo <https://balongbendo.sidoarjokab.go.id/> dan pada peta pola ruang dan peta struktur ruang wilayah Kecamatan Balongbendo secara digital maupun analog belum di tempel lobby pelayanan dan di website resmi Kecamatan Balongbendo.

5.2 ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO

Pada arah kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan dari Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo adalah:

1. Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis IT
2. Evaluasi secara berkala mengenai pelayanan sesuai dengan SOP
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan evaluasi pelayanan
4. Melakukan koordinasi antar OPD yang ada di Kecamatan Balongbendo
5. Meningkatkan kinerja perangkat Kecamatan
6. Pendampingan kepada masyarakat dan desa untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum untuk kepentingan bersama



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

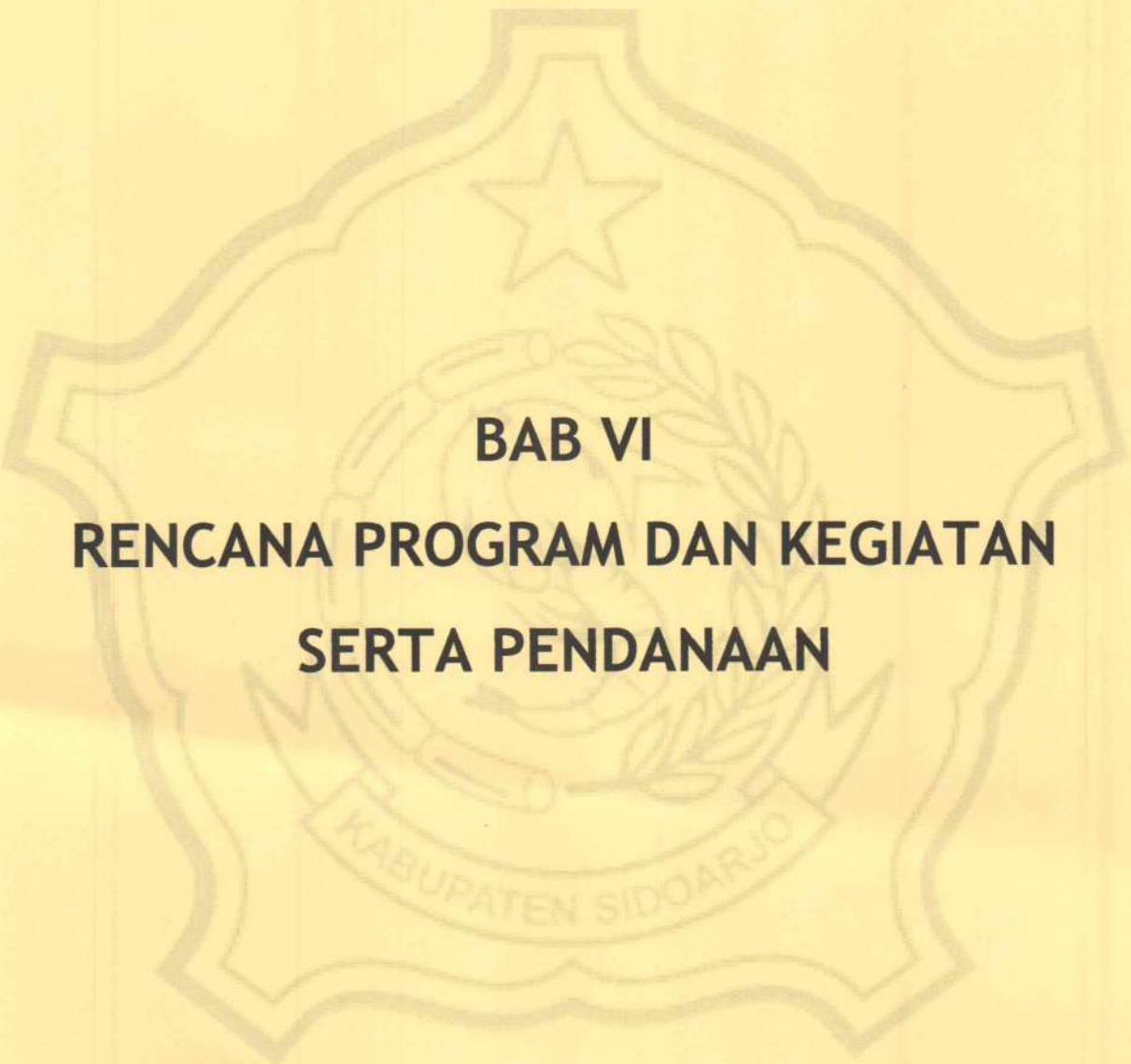
**Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan**

VISI :Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju,Berkarakter dan Berkelanjutan.

MISI 1:Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha

MISI 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	1. Mengembangkan sistem pelayanan kepada masyarakat berbasis sistem IT 2. Memudahkan jangkauan dalam akses pada masing-masing desa	1. Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis IT 2. Evaluasi secara berkala mengenai pelayanan sesuai dengan SOP 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan evaluasi pelayanan 4. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Balongbendo 5. Meningkatkan kinerja perangkat kecamatan
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Penciptaan ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat	1. Memberikan arahan, sosialisasi serta pendampingan kepada masyarakat dan desa untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum untuk kepentingan bersama

The background features a large, faint watermark of the official logo of Kabupaten Sidoarjo. The logo is a shield-shaped emblem with a five-pointed star at the top, a central circular seal containing a figure, and a banner at the bottom with the text 'KABUPATEN SIDOARJO'.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 KONSISTENSI DAN KETERHUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RENSTRA-PD DENGAN DOKUMEN RPJMD

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksud sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang direncanakan untuk periode tahun 2021 – 2026 meliputi:

- A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 2. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- B. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
 - b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan
 - b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
 - c. Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
- D. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - b. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- E. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan"
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Penyediaan Bahan/Material
 - h. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pengadaan Mebel
 - d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Mebel
- d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- f. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo
Kabupaten Sidoarjo**

Tujuan PD	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik (88,05)	Baik (81,50)	6.269.916.060	Sangat Baik (88,31)	6.231.772.824	Sangat Baik (89,00)	7.092.300.335	Sangat Baik (89,50)	10.355.346.013	Sangat Baik (90,20)	11.416.422.786	Sangat Baik (91,00)	15.118.992.866	Sangat Baik (91,00)	15.118.992.866	Camat	Kec. Balongbendo		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik (88,05)	Baik (81,50)	6.112.876.599	Sangat Baik (88,31)	6.197.440.824	NA	6.988.402.835	NA	10.215.531.013	NA	11.262.626.286	NA	14.949.816.716	NA	14.949.816.716	Camat	Kec. Balongbendo		
			Nilai SAKIP	NA	NA		A (80,01)		A (80,50)		A (81,00)		A (81,50)		A (82,00)		A (82,00)					



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

			Nilai RB	NA	NA		32,67		33		34		35		36		36			
			Nilai IPP	NA	NA		A-(4.10)		A-(4.20)		A-(4.30)		A-(4.40)		A-(4.50)		A-(4.50)			
			Prosentase serapan anggaran	NA %	NA %		90%		NA %		NA %		NA %		NA %		NA %			
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	a. 100 %	a. 100 %	898.572.508	a. 100 %	1.176.052.450	a. 100 %	426.450.000	a. 100 %	2.777.060.000	a. 100 %	3.689.377.000	a. 100 %	4.418.056.400	a. 100 %	4.418.056.400	Camat	Kec. Balongbendo
			b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	b. 100 %	b. 100 %		b. 100 %		b. 100 %		b. 100 %		b. 100 %		b. 100 %		b. 100 %			
			c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	c. 100 %	c. 100 %		c. 100 %		c. 100 %		c. 100 %		c. 100 %		c. 100 %		c. 100 %			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti (.....berkas)	4900 Berkas	4900 Berkas	64.824.200	4900 Berkas	26.025.000	4900 Berkas	52.612.500	4900 Berkas	315.500.000	4900 Berkas	478.000.000	4900 Berkas	640.556.400	4900 Berkas	640.556.400	Sekretaris Kecamatan	Kec. Balongbendo
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	a. Jumlah pelayanan umum yang diterima (.....berkas)	a. 5000 Berkas	a. 5000 Berkas	64.824.200	a. 5000 Berkas	26.025.000	a. NA Berkas	52.612.500	a. NA Berkas	315.500.000	a. NA Berkas	478.000.000	a. NA Berkas	640.556.400	a. NA Berkas	640.556.400	Kepala Sub Bagian Umum dan	Kec. Balongbendo



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	b. Jumlah Peserta sosialisasi Pelayanan Umum (.....orang)	b. 40 Orang	b. 40 Orang		b. 40 Orang	b. NA Orang	b. NA Orang	b. NA Orang	b. NA Orang	b. NA Orang	b. NA Orang	b. NA Orang	b. NA Orang	b. NA Orang	b. NA Orang		Kepegawaian			
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (.....Laporan)	NA Laporan	NA Laporan		NA Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan					
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun (.....laporan)	2 laporan	13 laporan	266.510.076	24 Laporan	503.147.500	56 Laporan	257.762.500	18 Laporan	2.075.600.000	18 Laporan	2.621.377.000	18 Laporan	2.950.000.000	18 Laporan	2.950.000.000	Sekretaris Kecamatan	Kec. Balongbendo		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	a. Jumlah rapat koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang dilaksanakan (.....kegiatan)	a. 5 kegiatan	a. 7 kegiatan	266.510.076	a. 7 kegiatan	503.147.500	a. NA kegiatan	257.762.500	a. NA kegiatan	2.075.600.000	a. NA kegiatan	2.621.377.000	a. NA kegiatan	2.950.000.000	a. NA kegiatan	2.950.000.000	Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Perekonomian, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepala Seksi Pembangunan	Kec. Balongbendo		
		b. Jumlah rapat koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang dilaksanakan (.....kegiatan)	b. 2 kegiatan	b. 2 kegiatan		b. 2 kegiatan		b. NA kegiatan		b. NA kegiatan		b. NA kegiatan		b. NA kegiatan		b. NA kegiatan					
		c. Jumlah rapat koordinasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan (.....kegiatan)	c.6 kegiatan	c. 4 kegiatan		c. 4 kegiatan		c. NA kegiatan		c. NA kegiatan		c. NA kegiatan		c. NA kegiatan		c. NA kegiatan					



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

		d. Jumlah rapat koordinasi bidang perekonomian yang dilaksanakan (.....kegiatan)	d. 0 kegiatan	d. 0 kegiatan		d. 0 kegiatan	d. NA kegiatan		d. NA kegiatan		d. NA kegiatan		d. NA kegiatan		d. NA kegiatan				
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (.....Laporan)	NA Laporan	NA Laporan		NA Laporan	24 Laporan		24 Laporan		24 Laporan		24 Laporan		24 Laporan				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	a. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan (....berkas)	a. 12 Berkas	a. 12 Berkas	567.238.232	a. 12 Berkas	646.879.950	a. NA Berkas	116.075.000	a. NA Berkas	385.960.000	a. NA Berkas	590.000.000	a. NA Berkas	827.500.000	a. NA Berkas	827.500.000	Sekretaris Kecamatan	Kec. Balongbendo
		b. Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat, agama dan masyarakat; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun (.....laporan)	b. 16 Laporan	b. 16 Laporan		b. 16 Laporan		b. 4 Laporan		b. 4 Laporan		b. 4 Laporan		b. 4 Laporan		b. 4 Laporan			
		c. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun (.....laporan)	c. 0 Laporan	c. 0 Laporan		c. 14 Laporan		c. 4 Laporan		c. 4 Laporan		c. 4 Laporan		c. 4 Laporan		c. 4 Laporan			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non	Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang terdaftar	15 Berkas	15 Berkas	3.532.500	15 Berkas	0	NA Berkas	0	NA Berkas	0	NA Berkas	0	NA Berkas	0	NA Berkas	0	Kepala Seksi Pembangunan	Kec. Balongbendo



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

	Usaha	(.....berkas)				NA			NA			NA			NA				
			NA Dokumen	NA Dokumen		NA Dokumen	NA Dokumen		NA Dokumen	NA Dokumen		NA Dokumen	NA Dokumen						
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (.....Dokumen)	a. Jumlah monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat (.....kegiatan)	a. 4 kegiatan	a. 4 kegiatan	6.222.500	a. 4 kegiatan	5.675.000	a. NA kegiatan	48.875.000	a. NA kegiatan	218.110.000	a. NA kegiatan	315.000.000	a. NA kegiatan	375.000.000	a. NA kegiatan	375.000.000	Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Perencanaan, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepala Seksi Pembangunan	Kec. Balongbendo
			b. 4 kegiatan	b. 4 kegiatan		b. 4 kegiatan		b. NA kegiatan		b. NA kegiatan		b. NA kegiatan		b. NA kegiatan		b. NA kegiatan			
			c. 4 kegiatan	c. 4 kegiatan		c. 4 kegiatan		c. NA kegiatan		c. NA kegiatan		c. NA kegiatan		c. NA kegiatan		c. NA kegiatan			
			d. 4 kegiatan	d. 4 kegiatan		d. 4 kegiatan		d. NA kegiatan		d. NA kegiatan		d. NA kegiatan		d. NA kegiatan		d. NA kegiatan			
			NA Laporan	NA Laporan		NA Laporan		16 Laporan		16 Laporan		16 Laporan		16 Laporan		16 Laporan			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	a. Jumlah Kegiatan pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik yang telah dilaksanakan (...kegiatan)	a. 0 kegiatan	a. 4 kegiatan	557.483.232	a. 4 kegiatan	641.204.950	a. NA kegiatan	67.200.000	a. NA kegiatan	167.850.000	a. NA kegiatan	275.000.000	a. NA kegiatan	452.500.000	a. NA kegiatan	452.500.000	Kepala Seksi Perencanaan dan Kepala Seksi Pembangunan	Kec. Balongbendo	
		b. 0 kegiatan	b. 10 kegiatan		b. 10 kegiatan		b. NA kegiatan		b. NA kegiatan		b. NA kegiatan		b. NA kegiatan		b. NA kegiatan				



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

			c. Jumlah kegiatan pembinaan pedagang kaki lima yang telah dilaksanakan (...kegiatan)	c. 0 kegiatan	c. 0 kegiatan		c. 0 kegiatan	c. 0 kegiatan		c. 0 kegiatan		c. 0 kegiatan		c. 0 kegiatan		c. 0 kegiatan				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (...Laporan)	NA Laporan	NA Laporan		NA Laporan	14 Laporan		14 Laporan		14 Laporan		14 Laporan		14 Laporan				
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	0	100%	15.499.164	100%	140.062.000	100%	218.933.115	100%	188.721.738	100%	190.573.038	100%	190.573.038	Camat	Kec. Balongbendo
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (...kegiatan)	0 Kegiatan	0 kegiatan	0	1 kegiatan	15.499.164	2 kegiatan	140.062.000	5 kegiatan	218.933.115	5 kegiatan	188.721.738	5 kegiatan	190.573.038	5 kegiatan	190.573.038	Sekretaris Kecamatan	Kec. Balongbendo
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	a. Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan (...kegiatan) b. Jumlah lomba-lomba yang dilaksanakan untuk memperingati hari besar nasional (...kegiatan)	a. 0 kegiatan b. 0 kegiatan	a. 1 kegiatan b. 0 kegiatan	0	a. 1 kegiatan b. 0 kegiatan	15.499.164	a. NA kegiatan b. NA kegiatan	54.862.000	a. NA kegiatan b. NA kegiatan	153.120.615	a. NA kegiatan b. NA kegiatan	142.046.738	a. NA kegiatan b. NA kegiatan	142.698.038	a. NA kegiatan b. NA kegiatan	142.698.038	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Balongbendo



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026

		Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (..... orang)	NA Orang	NA Orang	NA Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang				
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan Forkopimka yang dilaksanakan (..... kegiatan)	NA Kegiatan	NA Kegiatan	0	NA Kegiatan	41.85 0.000	NA Kegiatan	52.312.5 00	NA Kegiatan	32.500.0 00	NA Kegiatan	32.50 0.000	NA Kegiatan	32.50 0.000	Kepala Seksi Ketentra man dan Ketertiba n Umum	Kec. Balongb endo		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (..... Dokumen)	NA Dokume n	NA Dokume n		4 Dokume n		4 Dokume n		4 Dokume n		4 Dokume n		4 Dokume n					
		Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi pilkada, pileg, pilpres (.....desa)	NA Desa	NA Desa	0	NA Desa	43.35 0.000	NA Desa	13.500.0 00	NA Desa	14.175.0 00	NA Desa	15.37 5.000	NA Desa	15.37 5.000	Kepala Seksi Ketentra man dan Ketertiba n Umum	Kec. Balongb endo		
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (..... Lembaga masyarakat)	NA Lembag a Masayar akat	NA Lembag a Masayar akat		4 Lembag a Masayar akat		4 Lembag a Masayar akat		4 Lembag a Masayar akat		4 Lembag a Masayar akat		4 Lembag a Masayar akat					



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026

		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	48.282.500	100%	4.175.000	100%	69.900.000	100%	87.422.500	100%	96.164.750	100%	105.781.225	100%	105.781.225	Camat	Kec. Balongbendo		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu (.....desa)	20 Desa	20 Desa	48.282.500	20 Desa	4.175.000	20 Desa	69.900.000	20 Desa	87.422.500	20 Desa	96.164.750	20 Desa	105.781.225	20 Desa	105.781.225	Sekretaris Kecamatan	Kec. Balongbendo		
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	a. Jumlah APBDesa yang telah dievaluasi	a. 20 Desa	a. 20 Desa	0	a. 20 Desa	0	a. NA Desa	35.100.000	a. NA Desa	50.882.500	a. NA Desa	56.664.750	a. NA Desa	59.650.000	a. NA Desa	59.650.000	Kepala Seksi Pemerintahan	Kec. Balongbendo		
			b. Jumlah APBDesa perubahan yang telah dievaluasi	b. 20 Desa	b. 20 Desa		b. 20 Desa		b. NA Desa		b. NA Desa		b. NA Desa		b. NA Desa		b. NA Desa					
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (..... Dokumen)	NA dokumen	NA dokumen		NA dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen					
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	48.282.500	1 kegiatan	4.175.000	NA kegiatan	34.800.000	NA kegiatan	36.540.000	NA kegiatan	39.500.000	NA kegiatan	46.131.225	NA kegiatan	46.131.225	Kepala Seksi Pemerintahan	Kec. Balongbendo		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (..... Dokumen)	NA dokumen	NA dokumen		NA dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen					



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	83%	90,60%	5.166.02 1.591	90,50%	5.001.71 4.210	91%	6.351. 990.8 35	91,50%	7.132.11 5.398	92%	7.288.36 2.798	92,00%	10.23 5.406. 053	92,00%	10.23 5.406. 053	Camat	Kec. Balongbendo
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	a. 3 kali	a. 2 kali	72.520.6 20	a. 2 kali	0	a. 2 kali	0	a. 2 kali	184.252. 600	a. 2 kali	189.750. 000	a. 3 kali	306.0 00.00 0	a. 3 kali	306.0 00.00 0	Sekretaris Kecamatan	Kec. Balongbendo
			b. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	b. 1 kali	b. 1 kali		b. 1 kali	b. 1 kali	b. 1 kali	b. 1 kali	b. 1 kali		b. 1 kali		b. 1 kali		b. 1 kali			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	3 dokumen	2 dokumen	71.011.0 00	2 dokumen	0	NA dokumen	0	NA dokumen	45.000.0 00	NA dokumen	45.000.0 00	NA dokumen	180.0 00.00 0	NA dokumen	180.0 00.00 0	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Balongbendo
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (..... Dokumen)	NA dokumen	NA dokumen		NA dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	0	NA dokumen	0	NA dokumen	1.500.00 0	NA dokumen	1.500.00 0	NA dokumen	1.500. 000	NA dokumen	1.500. 000	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Balongbendo
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (..... Dokumen)	NA dokumen	NA dokumen		NA dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	0	NA dokumen	0	NA dokumen	1.500.00 0	NA dokumen	1.500.00 0	NA dokumen	1.500. 000	NA dokumen	1.500. 000	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Balongbendo
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	NA dokumen	NA dokumen		NA dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen						



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026

			Dokumen Perubahan RKA-SKPD (..... Dokumen)																			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	240.000	1 dokumen	0	NA dokumen	0	NA dokumen	1.500.000	NA dokumen	1.500.000	NA dokumen	1.500.000	NA dokumen	1.500.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Balongbendo		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (..... Dokumen)	NA dokumen	NA dokumen		NA dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen					
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	0	NA dokumen	0	NA dokumen	1.500.000	NA dokumen	1.500.000	NA dokumen	1.500.000	NA dokumen	1.500.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Balongbendo		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (..... Dokumen)	NA dokumen	NA dokumen		NA dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja PD yang disusun	2 laporan	2 laporan	1.269.620	2 laporan	0	NA laporan	0	NA laporan	61.252.600	NA laporan	65.250.000	NA laporan	60.000.000	NA laporan	60.000.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Balongbendo		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	NA laporan	NA laporan		NA laporan		NA laporan		NA laporan		NA laporan		NA laporan		NA laporan					
			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (..... Laporan)	NA laporan	NA laporan		NA laporan		3 laporan		3 laporan		3 laporan		3 laporan		3 laporan					



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA RENCANA BENDAHARA
 KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
 TAHUN 2021-2026

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev PD yang disusun	4 laporan	4 laporan	0	4 laporan	0	NA laporan	0	NA laporan	72.000.000	NA laporan	73.500.000	NA laporan	60.000.000	NA laporan	60.000.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Balongbendo
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (. Laporan)	NA laporan	NA laporan		NA laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	83%	84%	3.491.960.768	84%	3.591.728.933	86%	4.096.170.235	87%	4.292.478.747	88%	4.387.885.098	89%	4.662.056.053	88%	4.662.056.053	Sekretaris Kecamatan	Kec. Balongbendo
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	29 Orang	29 Orang	3.487.079.643	29 Orang	3.591.728.933	NA orang	4.096.170.235	NA orang	4.270.978.747	NA orang	4.366.385.098	NA orang	4.644.556.053	NA orang	4.644.556.053	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Balongbendo
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (..... Orang/bulan)	NA orang	NA orang		NA orang		25 orang		25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang				
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diterbitkan	214 dokumen	300 dokumen	618.127	300 dokumen	0	NA dokumen	0	NA dokumen	9.000.000	NA dokumen	9.000.000	NA dokumen	6.500.000	NA dokumen	6.500.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Balongbendo
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (..... Dokumen)	NA dokumen	NA dokumen		NA dokumen		4 dokumen		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	110.000	1 Laporan	0	NA laporan	0	NA laporan	3.500.000	NA laporan	3.500.000	NA laporan	1.500.000	NA laporan	1.500.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Balongbendo
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (..... Laporan)	NA laporan	NA laporan		NA laporan		1 laporan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan				



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN 2021-2026

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	12 Laporan	12 Laporan	4.152.998	12 Laporan	0	NA laporan	0	NA laporan	9.000.000	NA laporan	9.000.000	NA laporan	9.500.000	NA laporan	9.500.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Balongbendo
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (..... Laporan)	NA laporan	NA laporan		NA laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	a. Persentase ASN yang disiplin	a. 100 %	a. 100 %	1.587.500	a. 100 %	0	a. 100 %	75.470.000	a. 100 %	172.500.000	a. 100 %	173.325.000	a. 100 %	230.500.000	a. 100 %	230.500.000	Sekretaris Kecamatan	Kec. Balongbendo
			b. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	b. 0 %	b. 0 %		b. 0 %		b. 0 %			b. 0 %		b. 0 %		b. 0 %		b. 0 %		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan	1 paket	0 paket	0	0 paket	0	NA paket	4.995.000	NA paket	36.000.000	NA paket	30.000.000	NA paket	32.500.000	NA paket	32.500.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Balongbendo
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (..... Paket)	NA paket	NA paket		NA paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket			
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	29 orang	0 orang	1.587.500	0 orang	0	NA orang	70.475.000	NA orang	136.500.000	NA orang	143.325.000	NA orang	198.000.000	NA orang	198.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Balongbendo
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (..... Orang)	NA orang	NA orang		NA orang		39 orang		39 orang		39 orang		39 orang		39 orang			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	82	82	236.616.741	85,5	345.265.287	89	486.122.376	98,13	707.000.000	98,25	729.600.000	98,5	1.293.600.000	88	1.293.600.000	Sekretaris Kecamatan	Kec. Balongbendo



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	jenis komponen listrik /penerangan yang tersedia	94 paket	107 paket	5.069.886	107 paket	4.832.080	NA paket	4.680.648	NA paket	18.000.000	NA paket	18.900.000	NA paket	27.500.000	NA paket	27.500.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Balongbendo		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (..... Paket)	NA paket	NA paket		NA paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	57 buah	1160 buah	2.999.143	1160 buah	22.299.042	NA buah	27.902.904	NA buah	48.000.000	NA buah	50.400.000	NA buah	65.000.000	NA buah	65.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Balongbendo		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (..... Paket)	NA buah	NA buah		NA buah	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket				
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	0 paket	13 paket	0	13 paket	12.669.140	NA paket	7.525.079	NA paket	15.000.000	NA paket	15.750.000	NA paket	38.000.000	NA paket	38.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Balongbendo		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (..... Paket)	NA paket	NA paket		NA paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	a. Jumlah BBM yang disediakan	a. 6666 liter	a. 6000 liter	113.000.000	a. 6000 liter	118.700.000	a. NA liter	134.000.000	a. NA liter	180.000.000	a. NA liter	195.000.000	a. NA liter	198.000.000	a. NA liter	198.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Balongbendo		
			b. Jenis logistik rumah tangga kantor yang tersedia	b. 4800 liter	b. 8.200 liter		b. 8.200 liter		b. NA liter		b. NA liter		b. NA liter		b. NA liter		b. NA liter					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (..... Paket)	NA paket	NA paket		NA paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis	8.819.700	2 Jenis	14.700.000	NA Jenis	21.320.000	NA Jenis	27.500.000	NA Jenis	28.875.000	NA Jenis	47.500.000	NA Jenis	47.500.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Balongbendo		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (..... Paket)	NA paket	NA paket		NA paket	1 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket				



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia jenis)	2 Jenis	2 Jenis	3.600.000	2 Jenis	4.356.000	NA Jenis	0	NA Jenis	6.000.000	NA Jenis	6.300.000	NA Jenis	6.600.000	NA Jenis	6.600.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Balongbendo
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	NA Dokumen	NA Dokumen		NA Dokumen	0 Dokumen			12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
		Penyediaan Bahan/Material	Jenis bahan/material yang tersedia	17 Jenis	22 Jenis	5.445.559	22 Jenis	21.601.196	NA Jenis	22.343.745	NA Jenis	37.500.000	NA Jenis	39.375.000	NA Jenis	96.000.000	NA Jenis	96.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Balongbendo
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (..... Paket)	NA paket	NA paket		NA paket	1 paket			1 paket		1 paket		1 paket		1 paket			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Jenis jamuan yang disediakan	a. 1200 kotak	a. 1200 kotak	24.842.960	a. 1200 kotak	F	a. NA kotak	78.350.000	a. NA kotak	165.000.000	a. NA kotak	165.000.000	a. NA kotak	365.000.000	a. NA kotak	365.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Balongbendo
			b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	b. 12 bulan	b. 12 bulan		b. 12 bulan		b. NA bulan		b. NA bulan		b. NA bulan		b. NA bulan		b. NA bulan			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (..... Laporan)	NA laporan	NA laporan		NA laporan	24 laporan			24 laporan		24 laporan		24 laporan		24 laporan			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	a. 100 %	a. 100 %	72.839.493	a. 100 %	146.107.829	a. NA %	190.000.000	a. NA %	210.000.000	a. NA %	210.000.000	a. NA %	450.000.000	a. NA %	450.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Balongbendo
			b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	b. 0 kali	b. 0 kali		b. 0 kali		b. 0 NA		b. 0 NA		b. 0 NA		b. 0 NA		b. 0 NA			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (..... Laporan)	NA laporan	NA laporan		NA laporan	250 laporan			12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jenis BMD yang diadakan	16 unit	0 unit	113.886.762	0 unit	73.930.790	NA unit	552.940.524	NA unit	638.981.351	NA unit	670.900.000	NA unit	2.372.500.000	NA unit	2.372.500.000	Sekretaris Kecamatan	Kec. Balongbendo



RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN 2021-2026

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 bulan	12 bulan	142.000.000	12 bulan	148.840.000	NA bulan	155.885.000	NA bulan	165.000.000	NA bulan	165.000.000	NA bulan	173.250.000	NA bulan	173.250.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Balongbendo
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (..... Laporan)	NA laporan	NA laporan		NA laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	a. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	a. 3 orang	a. 3 orang	631.560.200	a. 3 orang	652.149.200	a. NA orang	674.402.700	a. NA orang	674.402.700	a. NA orang	674.402.700	a. NA orang	900.000.000	a. NA orang	900.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Balongbendo
			b. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	b. 0 orang	b. 0 orang		b. 0 orang		b. NA orang		b. NA orang		b. NA orang		b. NA orang		b. NA orang			
			c. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	c. 14 orang	c. 15 orang		c. 15 orang		c. NA orang		c. NA orang		c. NA orang		c. NA orang		c. NA orang			
			d. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	d. 11 orang	d. 11 orang		d. 11 orang		d. NA orang		d. NA orang		d. NA orang		d. NA orang		d. NA orang			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (..... Laporan)	NA laporan	NA laporan		NA laporan		17 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	40 unit	37 unit	475.890.000	37 unit	189.800.000	NA unit	311.000.000	NA unit	297.500.000	NA unit	297.500.000	NA unit	297.500.000	NA unit	297.500.000	Sekretaris Kecamatan	Kec. Balongbendo
			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi	NA %	NA %		NA %		100%		100%		100%		100%		100%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	2 unit	2 unit	13.000.000	2 unit	27.500.000	NA unit	33.000.000	NA unit	33.000.000	NA unit	33.000.000	NA unit	33.000.000	NA unit	33.000.000	Kepala Sub Bagian Umum	Kec. Balongbendo



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

		Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (..... Unit)	NA unit	NA unit		NA unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		dan Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	a. Jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara;	a. 4 unit	a. 4 unit	15.000.000	a. 4 unit	23.500.000	a. NA unit	33.500.000	a. NA unit	33.500.000	a. NA unit	33.500.000	a. NA unit	33.500.000	a. NA unit	33.500.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Balongbendo
			b. Jenis bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia	b. 0 buah	b. 0 buah		b. 0 buah		b. NA buah		b. NA buah		b. NA buah		b. NA buah		b. NA buah			
			c. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	c. 4 unit	c. 4 unit		c. 4 unit		c. NA unit		c. NA unit		c. NA unit		c. NA unit		c. NA unit			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (..... Unit)	NA unit	NA unit		NA unit	4 unit	4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34 unit	30 unit	18.000.000	30 unit	25.000.000	NA unit	63.000.000	NA unit	33.000.000	NA unit	33.000.000	NA unit	33.000.000	NA unit	33.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Balongbendo
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (..... Unit)	NA unit	NA unit		NA unit	40 unit	40 unit		40 unit		40 unit		40 unit		40 unit			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	96 m2	90 m2	429.890.000	90 m2	113.800.000	NA m2	181.500.000	NA m2	198.000.000	NA m2	198.000.000	NA m2	198.000.000	NA m2	198.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Balongbendo
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (..... Unit)	NA unit	NA unit		NA unit	1 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit			



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	NA %	100	157.039.461	100%	34.332.000	NA %	103.897.500	NA %	139.815.000	NA %	153.796.500	NA %	169.176.150	NA %	169.176.150	Camat	Kec. Balongbendo
			Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	NA %	NA %		NA %		100%		100%		100%		100%		100%			
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	100%	157.039.461	100%	34.332.000	100%	103.897.500	100%	139.815.000	100%	153.796.500	100%	169.176.150	100%	169.176.150	Camat	Kec. Balongbendo
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun (...laporan)	2 laporan	13 laporan	102.289.461	24 laporan	9.137.500	56 laporan	89.647.500	18 laporan	103.815.000	18 laporan	117.796.500	18 laporan	133.176.150	18 laporan	133.176.150	Sekretaris Kecamatan	Kec. Balongbendo
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	a. Jumlah kegiatan koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan (...kegiatan)	a. 2 kegiatan	a. 0 kegiatan	82.014.461	a. 0 kegiatan	0	a. NA kegiatan	35.700.000	a. NA kegiatan	17.500.000	a. NA kegiatan	17.500.000	a. NA kegiatan	17.500.000	a. NA kegiatan	17.500.000	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Balongbendo
			b. Jumlah kegiatan pembinaan Linmas yang dilaksanakan (...kegiatan)	b. 0 kegiatan	b. 0 kegiatan		b. 0 kegiatan		b. NA kegiatan		b. NA kegiatan		b. NA kegiatan		b. NA kegiatan		b. NA kegiatan			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (... Laporan)	NA Laporan	NA Laporan		NA Laporan		12 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan			




**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan (.....kegiatan)	0 kegiatan	3 kegiatan	20.275.000	3 kegiatan	9.137.500	NA kegiatan	53.947.500	NA kegiatan	86.315.000	NA kegiatan	100.296.500	NA kegiatan	115.676.150	NA kegiatan	115.676.150	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Kec. Balongbendo
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (.....Laporan)	NA Laporan	NA Laporan		NA Laporan		5 Laporan		1 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan			
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang difasilitasi (,..permasalahan)	1 permasalahan	6 permasalahan	54.750.000	6 permasalahan	25.194.500	6 permasalahan	14.250.000	6 permasalahan	36.000.000	6 permasalahan	36.000.000	6 permasalahan	36.000.000	6 permasalahan	36.000.000	Sekretaris Kecamatan	Kec. Balongbendo
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	a. Jumlah operasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan (.....kegiatan)	a. 4 kegiatan	a. 12 kegiatan	54.750.000	a. 12 kegiatan	25.194.500	a. NA kegiatan	14.250.000	a. NA kegiatan	36.000.000	a. NA kegiatan	36.000.000	a. NA kegiatan	36.000.000	a. NA kegiatan	36.000.000	Kepala Seksi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kec. Balongbendo
			b. Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang terdaftar (.....permasalahan)	b. 1 permasalahan	b. 6 permasalahan		b. 6 permasalahan		b. NA permasalahan		b. NA permasalahan		b. NA permasalahan		b. NA permasalahan		b. NA permasalahan			
			c. Jumlah monev bidang ketertarikan dan ketertiban umum yang dilaksanakan (.....kegiatan)	c. 4 kegiatan	c. 4 kegiatan		c. 4 kegiatan		c. NA kegiatan		c. NA kegiatan		c. NA kegiatan		c. NA kegiatan		c. NA kegiatan			



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026

			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (..... Laporan)	NA Laporan	NA Laporan		NA Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan			
--	--	--	---	------------	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	--	--



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 KETERHUBUNGAN DAN KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH DALAM DOKUMEN RENSTRA PD

Penetapan indikator kinerja sebagai ukuran kinerja PD yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan dari suatu organisasi pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan cepat, tepat serta akurat jika dilakukan dengan penetapan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja tersebut sebagai syarat penting untuk menetapkan rencana strategis sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Startegis Organisasi. Misi dari pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo dan sinergi dengan fungsi tugas dari Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo adalah dari misi pertama yakni **"Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha"**. dan misi kelima yakni **"Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga"**

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 0)	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Tujuan 1: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum							



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) kecamatan	Baik (87,15)	Sangat Baik (88,31)	Sangat Baik (89,00)	Sangat Baik (89,50)	Sangat Baik (90,20)	Sangat Baik (91,00)	Sangat Baik (91,00)
A	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan							
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik (81,50)	Sangat Baik (88,31)	NA	NA	NA	NA	NA
2	Nilai SAKIP	NA	A (80, 01)	A (80,50)	A (81,00)	A (81,50)	A (82,00)	A (82,00)
3	Nilai RB	NA	32,67	33	34	35	36	36
4	Nilai IPP	NA	A- (4,10)	A- (4,20)	A- (4,30)	A- (4,40)	A- (4,50)	A- (4,50)
5	Persentase Serapan Anggaran	N/A	90 %	NA	NA	NA	NA	NA
B	Sasaran 2: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum							
1	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7.2

**DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO**

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Cara Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai SKM diperoleh secara otomatis dari laman http://ikm.sidoarjokab.go.id/ . Dengan range penilaian	a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman	http://ikm.sidoarjokab.go.id/



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

	<p>sebagai berikut</p> <p>a) 25,00 – 64,99 (D) = Tidak baik</p> <p>b) 65,00 – 76,60 (C) = Kurang baik</p> <p>c) 76,61 – 88,30 (B) = Baik</p> <p>d) 88,31 – 100,00 (A) = Sangat baik</p>	<p>Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>b. Pemohon / penerima layanan mengisi kuesioner melalui website http://ikm.sidoarjokab.go.id/.</p> <p>c. Nilai akan otomatis generated by system.</p>	
1. Nilai SAKIP	<p>Nilai diberikan oleh inspektorat dengan range sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AA dengan hasil penilaian 90-100 2. A untuk hasil nilai 80-90. 3. BB untuk hasil nilai 70-80 4. B untuk hasil nilai 60-70 5. CC untuk hasil nilai 50-60 6. C untuk hasil nilai 30-50 7. D dengan hasil nilai 0-30 	<p><i>Untuk mengukur tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah:</i></p>	LHE Inspektorat
2. Nilai RB	<p>Untuk OPD, Yang dinilai hanya komponen pengungkit dari sisi pemenuhan dan reform</p>	<p><i>Untuk mengukur tingkat Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian berdasarkan Peraturan Bupati nomor 082 tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2. Mengisi LKE dari Inspektorat 	LHE Inspektorat
3. Nilai IPP	<p>Indeks penilaian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 0 – 1,00 F Gagal b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk c. 1,51 – 2,00 D Buruk d. 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) e. 2,51 – 3,00 C Cukup 	<p><i>Untuk mengukur tingkat Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Laporan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Sidoarjo



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

	f. 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan Catatan) g. 3,51 – 4,00 B Baik h. 4,01 – 4,50 A- Sangat Baik i. 4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima	2. Paparan di depan tim penilai kinerja pelayanan publik	
Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	Prosentase dilihat dari Register Permasalahan yang masuk ke Kantor Kecamatan	<i>Untuk mengukur Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan</i> Jumlah permasalahan trantibum yang diselesaikan dalam satu tahun/jumlah permasalahan trantibum yang ditindaklanjuti dalam satu tahun x 100%	Register Seksi Trantibum

The image features a large, faint watermark of the Kabupaten Sidoarjo logo in the background. The logo is a shield-shaped emblem with a five-pointed star at the top, a central figure, and a banner at the bottom that reads "KABUPATEN SIDOARJO".

BAB VIII
PENUTUP



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

BAB VIII PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021- 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Balongbendo dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2021-2026. Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Balongbendo, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian Rencana Strategis ini merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balongbendo.

Sidoarjo, 31 Maret 2023

**CAMAT BALONGBENDO
KABUPATEN SIDOARJO**



ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM

Pembina

NIP. 19790114 199711 1 001

FORMULIR E.73

CHECKLIST PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN/KOTA : SIDOARJO

PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH : 2021 - 2026

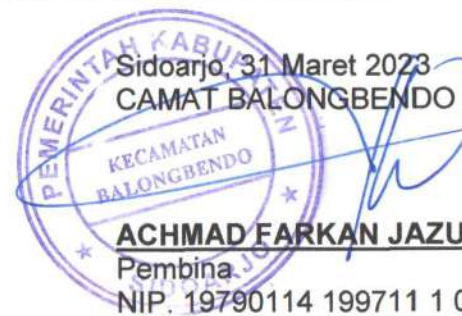
RPJMD Kabupaten Sidoarjo	Renstra Kecamatan Balongbendo	Kesesuaian / relevansi		Evaluasi	Tindaklanjut	Hasil tindaklanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
<p>Visi dan Misi</p> <p>Visi :</p> <p>Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan</p> <p>Misi :</p> <p>1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.</p> <p>2. Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.</p>	<p>Visi dan Misi</p> <p>Visi :</p> <p>Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan</p> <p>Misi :</p> <p>1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.</p> <p>2. Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.</p>	√		Sudah sesuai antara RPJMD kabupaten Sidoarjo dengan renstra OPD		
Tujuan dan sasaran	Tujuan dan sasaran	√		Sudah sesuai antara RPJMD kabupaten		

<p>Tujuan1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha.</p> <p>Sasaran 1 : Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha.</p> <p>Tujuan 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.</p> <p>Sasaran 13 : Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram.</p>	<p>Tujuan1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha.</p> <p>Sasaran 1 : Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha</p> <p>Tujuan 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.</p> <p>Sasaran 13 : Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram.</p>			<p>Sidoarjo dengan renstra OPD</p>		
<p>Strategi dan kebijakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jangkauan pelayanan publik terpadu (Mall Pelayanan Publik) 2. Inovasi pelayanan publik terintegrasi berbasis teknologi digital 3. Percepatan Pelayanan melalui Pemangkasan birokrasi dan tahapan ijin 	<p>Strategi dan kebijakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jangkauan pelayanan publik terpadu (Mall Pelayanan Publik) 2. Inovasi pelayanan publik terintegrasi berbasis teknologi digital 3. Percepatan Pelayanan melalui Pemangkasan birokrasi dan tahapan ijin usaha untuk 	√		<p>Sudah sesuai antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo dengan Renstra OPD</p>		

<p>usaha untuk kemudahan investasi</p> <p>4. Penciptaan ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat</p> <p>5. Peningkatan Kerjasama dan pola hubungan lintas agama, lintas etnis secara berkelanjutan.</p>	<p>kemudahan investasi</p> <p>4. Penciptaan ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat.</p> <p>5. Peningkatan Kerjasama dan pola hubungan lintas agama, lintas etnis secara berkelanjutan.</p>					
<p>Penetapan indikator kinerja daerah</p> <p>1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)</p> <p>2. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)</p> <p>3. Nilai SAKIP Kabupaten</p>	<p>Indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah</p> <p>1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)</p> <p>2. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)</p> <p>3. Nilai SAKIP Kecamatan Balongbendo</p>	√		<p>Sudah sesuai antara RPJMD kabupaten Sidoarjo dengan renstra OPD</p>		
<p>Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan</p> <p>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.356.827.290</p> <p>2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.163.968.078</p> <p>3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 99.000.000</p> <p>4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</p>	<p>Tujuan dan sasaran program dan kegiatan dan dana indikatif</p> <p>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.356.827.290</p> <p>2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.163.968.078</p> <p>3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 99.000.000</p> <p>4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 154.231.759</p> <p>5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN</p>	√		<p>Sudah sesuai antara RPJMD kabupaten Sidoarjo dengan renstra OPD</p>		

154.231.759	DAN KETERTIBAN UMUM 126.078.636					
5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 126.078.636						

Sidoarjo, 31 Maret 2023
CAMAT BALONGBENDO



ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM
Pembina
NIP. 19790114 199711 1 001

Formulir E.80
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten /Kota
Renstra Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo
 Periode Pelaksanaan : Tahun 2022-2026

Saasran PD	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program kegiatan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian Tahun ke-									
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2021		2022		2023		2024		2025		2026							
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	a. 100 %	a. 100 %	16.118.992.896	6.299.915.090	6.231.772.624	7.092.300.336	10.356.346.015	11.416.422.799	18.118.992.896	6.006.563.822	6.876.398.639																					
		b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	b. 100 %	b. 100 %																														
		c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	c. 100 %	c. 100 %																														
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti (.....berkas)	4900 Berkas	4600 Berkas	640.696.400	4900 Berkas	64.824.200	4900 Berkas	26.026.000	4900 Berkas	82.612.600	4900 Berkas	316.500.000	4900 Berkas	479.000.000	4900 Berkas	640.696.400	4900 Berkas	66.439.428	4900 Berkas	21.838.191						100,00	87,94	9,00	82,40					
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi hasil kegiatan dan pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun (.....laporan)	2 laporan	18 Laporan	2.960.000.000	13 laporan	284.610.078	24 Laporan	603.147.500	68 Laporan	267.762.500	18 Laporan	2.076.600.000	18 Laporan	2.621.377.000	18 Laporan	2.960.000.000	13 laporan	281.860.898	24 Laporan	181.711.776					100,00	94,43	100,00	30,16						
Peleaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	a. Jumlah permohonan IMB Rumah Tanggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan b. Jumlah laporan hasil monitoring bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasayarakatan, agama dan kemasayarakatan, pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun (.....laporan) c. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang terusun (.....laporan)	a. 12 Berkas	a. NA Berkas	827.500.000	a. 12 Berkas	867.238.232	a. 12 Berkas	646.879.960	a. NA Berkas	116.076.000	a. NA Berkas	385.960.000	a. NA Berkas	590.000.000	a. NA Berkas	827.500.000	a. 12 Berkas	483.144.702	a. 0 Berkas	660.986.800						100,00	86,17	100,00	86,62					
		b. 18 Laporan	b. 4 Laporan		b. 18 Laporan		b. 18 Laporan		b. 4 Laporan		b. 4 Laporan		b. 4 Laporan	b. 4 Laporan	b. 4 Laporan	b. 18 Laporan	b. 18 Laporan									100,00		100,00						
		c. 8 Laporan	c. 4 Laporan		c. 8 Laporan		c. 14 Laporan		c. 4 Laporan		c. 4 Laporan		c. 4 Laporan	c. 4 Laporan	c. 4 Laporan	c. 0 Laporan	c. 14 Laporan									100,00		100,00						
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	190.673.038	100%	0	100%	15.499.164	100%	140.062.000	100%	218.933.116	100%	188.721.738	100%	190.673.038	100%	0	100%	11.980.000						100,00	0,00	100,00	77,28					

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (.....kegiatan)	0 kegiatan	5 kegiatan	190.873.039	0 kegiatan	1 kegiatan	16.489.164	2 kegiatan	140.082.000	5 kegiatan	219.933.118	6 kegiatan	188.721.758	5 kegiatan	190.873.039	0 kegiatan	0 kegiatan	11.980.000	100,00	0,00	100,00	77,29		
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	106.791.228	100%	48.282.600	100%	4.176.000	100%	89.900.000	100%	87.422.600	100%	96.164.750	100%	106.791.228	100%	48.249.200	100%	4.168.000	100,00	99,93	100,00	99,76
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu (.....desa)	20 Desa	20 Desa	106.791.228	20 Desa	48.282.600	20 Desa	4.176.000	20 Desa	89.900.000	20 Desa	87.422.600	20 Desa	96.164.750	20 Desa	106.791.228	20 Desa	48.249.200	20 Desa	4.168.000	100,00	99,93	100,00	99,76
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan aparat perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	93%	92,00%	10.238.406.063	90,80%	6.186.021.891	90,90%	6.001.714.210	91%	6.361.990.638	91,60%	7.132.116.388	92%	7.288.362.798	92,00%	10.238.406.063	90,80%	6.017.790.948	100,00%	4.791.921.273	110,48	97,13	110,48	95,80
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	a. 3 kali	a. 3 kali	306.000.000	a. 2 kali	72.520.820	a. 2 kali	0	a. 2 kali	194.262.000	a. 2 kali	198.750.000	a. 3 kali	306.000.000	a. 2 kali	69.076.400	a. 2 kali	0	100,00	98,28	100,00	0,00		
	b. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	b. 1 kali	b. 1 kali		b. 1 kali		b. 1 kali		b. 1 kali		b. 1 kali		b. 1 kali		b. 1 kali		b. 1 kali	100,00		100,00				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	83%	89%	4.682.056.053	84%	3.491.990.768	84%	3.691.728.933	89%	4.096.170.238	87%	4.292.470.747	89%	4.387.888.088	89%	4.682.056.053	96,80%	3.392.628.206	89,73	3.426.710.886	114,05	97,15	105,63	96,41
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	a. Persentase ASN yang disiplin	a. 100 %	a. 100 %	230.600.000	a. 100 %	1.687.600	a. 100 %	0	a. 100 %	75.470.000	a. 100 %	172.600.000	a. 100 %	173.328.000	a. 100 %	230.600.000	a. 100 %	1.638.400	a. 100 %	0	100,00	96,81	100,00	0,00
	b. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	b. 0 %	b. 0 %		b. 0 %		b. 0 %		b. 0 %		b. 0 %		b. 0 %		b. 0 %		b. 0 %			100,00		100,00		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	82	88	1.293.600.000	82	238.616.741	88,6	397.281.787	89	496.122.378	88,13	707.000.000	89,26	729.600.000	89,6	1.293.600.000	87,16	228.007.482	88,13	368.834.911	108,28	96,36	114,77	89,57
Pengadaan Barang Milik Daerah	Jenis BMD yang diadakan	18 unit	2 jenis	2.372.600.000	0 unit	113.866.762	0 unit	72.930.790	NA unit	862.940.524	NA unit	638.981.361	NA unit	870.900.000	NA unit	2.372.600.000	0 unit	110.791.600	0 unit	67.223.600	0,00	97,28	0,00	90,93
	Jumlah BMD yang diadakan		10 jenis		2 jenis	0 jenis	5 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	3 jenis	0 jenis			100,00		100,00		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100%	100%	1.073.260.000	100%	773.680.200	100%	800.989.200	100%	820.387.700	100%	839.402.700	100%	839.402.700	100%	1.073.260.000	100%	764.936.430	100%	763.188.380	100,00	97,59	100,00	95,28
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	40 unit	NA unit	297.600.000	37 unit	478.890.000	37 unit	189.900.000	NA unit	311.000.000	NA unit	297.600.000	NA unit	297.600.000	NA unit	297.600.000	37 unit	460.900.619	37 unit	178.963.797	100,00	96,66	100,00	94,29
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi	NA %	100%		NA %		100%		100%		100%		100%		100%		NA %		NA %	NA		NA		



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN BALONGBENDO

Jl. Mayjen Bambang Yuwono No. 02 Kode Pos 61263 SIDOARJO
Telepon. (031) 8971003 Faks. (031) 8971003

E-mail : balongbendo@sidoarijakab.go.id Website : www.balongbendo.sidoarijakab.go.id

BERITA ACARA

HASIL PENYEMPURNAAN PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BALONGBENDO
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2023

Nomor : 050/61/438.7.11/2023

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **31** Bulan **Maret** Tahun **2023**, kami Tim Penyusun Perubahan Renstra Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Camat Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/01/438.7.11/2023, Tanggal 6 Januari 2023 telah melaksanakan Penyempurnaan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Zoom Meeting Fasilitasi dan Verifikasi Rancangan Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026 tanggal 21 Februari 2023 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo dipandu oleh Ibu HERNITA HADI LESTARI, S.STP (Perencana Bappeda) dan dihadiri Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Ibu I VERA SIADINA, S.STP., M.Si (Auditor Inspektorat) serta Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Ibu BASTARIYAH OKTAVIANA, A.Md (Pranata Komputer)
2. Zoom Meeting Rapat Persiapan Upload Dokumen ke esr.menpan tanggal 23 Februari 2023 yang dilaksanakan Bagian Organsiasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dipandu oleh Bapak ARIF MULYONO, S.STP., M.HP (Kepala Bagian Organisasi)
3. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 050/555/438.6.1/2023 tanggal 27 Maret 2023 perihal Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renstra PD Tahun 2021 - 2026 dengan rincian hasil sebagai berikut :

I. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD

a. Uraian Tujuan dan Indikator Sebelum Reviu

TUJUAN (Sebelum Perubahan)	TUJUAN (Setelah Perubahan)	Keterangan
TUJUAN Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	TUJUAN Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Tetap
Indikator : a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Indikator : a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Tetap

SASARAN (Sebelum Perubahan)	SASARAN (Setelah Perubahan)	Keterangan
SASARAN 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	SASARAN 1 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	
Indikator Kinerja : 1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Nilai SAKIP 3. Nilai RB 4. Nilai IPP 5. Presentase Serapan Anggaran	Indikator Kinerja : 1. Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	Perubahan indikator dari difasilitasi menjadi diselesaikan
SASARAN 2 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	SASARAN 2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	
Indikator Kinerja : Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	Indikator Kinerja : 1. Nilai SAKIP 2. Nilai RB 3. Nilai IPP	Penghapusan indikator Nilai SKM dan Persentase Serapan

1. FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian Formulasi IKU (Indikator Kinerja Utama) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama	Cara Pengukuran	Definisi Operasional
Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	Prosentase dilihat dari Register Permasalahan yang masuk ke Kantor Kecamatan	Jumlah permasalahan trantibum yang diselesaikan dalam satu tahun/jumlah permasalahan trantibum yang ditindaklanjuti dalam satu tahun x 100%

Indikator Kinerja Tambahan	Cara Pengukuran	Definisi Operasional
Nilai SKM Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pemohon / penerima layanan mengisi kuesioner melalui website http://ikm.sidoarjo.kab.go.id/. Nilai akan otomatis <i>generated by system</i>. 	<p>Nilai SKM diperoleh secara otomatis dari laman http://ikm.sidoarjo.kab.go.id/</p> <p>Dengan range penilaian sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 25,00 – 64,99 (D) = Tidak baik 65,00 – 76,60 (C) = Kurang baik 76,61 – 88,30 (B) = Baik 88,31 – 100,00 (A) = Sangat baik
Nilai SAKIP Kecamatan Balongbendo	<ol style="list-style-type: none"> Penilaian berdasarkan Peraturan Bupati nomor 082 tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Mengisi LKE dari Inspektorat 	<p>Nilai diberikan oleh inspektorat dengan range sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> AA dengan hasil penilaian 90-100 A untuk hasil nilai 80-90. BB untuk hasil nilai 70-80 B untuk hasil nilai 60-

		<p>70</p> <p>5. CC untuk hasil Inilai 50-60</p> <p>6. C untuk hasil nilai 30-50</p> <p>7. D dengan hasil nilai 0-30</p>
Nilai RB	<p>1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p> <p>2. Mengisi LKE dari inspektorat</p>	<p>Untuk OPD, Yang dinilai hanya komponen pengungkit dari sisi pemenuhan dan reform</p>
Nilai IPP	<p>1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>2. Paparan di depan tim penilai kinerja pelayanan publik</p>	<p>Indeks penilaian sebagai berikut :</p> <p>a. 0 – 1,00 F Gagal</p> <p>b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk</p> <p>c. 1,51 – 2,00 D Buruk</p> <p>d. 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan)</p> <p>e. 2,51 – 3,00 C Cukup</p> <p>f. 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan Catatan)</p> <p>g. 3,51 – 4,00 B Baik</p> <p>h. 4,01 – 4,50 A- Sangat Baik</p> <p>i. 4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima</p>

2. TARGET KINERJA

a. Rincian Target Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Perubahan

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	Baik (87,15)	Sangat Baik (88,31)	Sangat Baik (89)	Sangat Baik (89,50)	Sangat Baik (90,20)	Sangat Baik (91,00)	Sangat Baik (91,00)
Nilai SAKIP	Nilai	NA	A (80, 01)	A (80,50)	A (81,00)	A (81,50)	A (82,00)	A (82,00)
Nilai RB	Nilai	NA	32,67	33	34	35	36	36
Nilai IPP	Nilai	NA	A- (4,10)	A- (4,20)	A- (4,30)	A- (4,40)	A- (4,50)	A- (4,50)
Persentase Serapan Anggaran	%	NA	90	90,25	90,50	90,75	91	91
Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	%	NA	100	100	100	100	100	100

b. Rincian Target Indikator Kinerja Sasaran Setelah Perubahan (jika ada perubahan target sasaran Renstra PD)

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	%	NA	100	NA	NA	NA	NA	NA
Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	%	NA	NA	100	100	100	100	100

KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	%	NA	NA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								
Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	Berkas	4900 Berkas	4900 Berkas	4900 Berkas	4900 Berkas	4900 Berkas	4900 Berkas	4900 Berkas
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	Laporan	13 Laporan	24 Laporan	56 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan

KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Desa	20 Desa	20 Desa	20 Desa	20 Desa	20 Desa	20 Desa	20 Desa
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan masyarakat yang tersusun	Laporan	2 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang difasilitasi	Permasalahan	1 Permasalahan	6 Permasalahan	4 Permasalahan	4 Permasalahan	4 Permasalahan	4 Permasalahan	4 Permasalahan

Dari hasil Perubahan Renstra tersebut tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Perubahan Renstra PD ini digunakan sebagai masukan dalam Review RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
2. Rencana Strategis Tahun 2021-2026 masih relevan untuk digunakan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
3. Rencana Strategis Tahun 2021-2026 masih dapat digunakan/relevan untuk digunakan acuan dalam penyusunan dokumen RKA-SKPD.

Demikian kesimpulan hasil Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021–2026 Kecamatan Balongbendo di Tahun 2023 ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SIDOARJO

Dr. HERI SOESANTO,SH,MH
Pembina Utama Muda
NIP.19680519 198803 1 002

Sidoarjo, 31 Maret 2023
CAMAT BALONGBENDO



ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM
Pembina
NIP. 19790114 199711 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN BALONGBENDO**

JL. Mayjend Bambang Yuwono No. 2 Balongbendo Sidoarjo
Telepon : (031) 8971003 Fax : (031) 8971003
Email : balongbendo@sidoarjokab.go.id
Website : www.balongbendo.sidoarjokab.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balongbendo
Dari : Camat Balongbendo
Tanggal : 27 Maret 2023
Nomor : 005/57/438.7.11/2023
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Menindaklanjuti surat Kepala Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 050/555/438.6.1/2023 Tanggal 27 Maret 2023 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renstra PD Tahun 2021 -2026, dengan ini mohon kehadiran saudara beserta 1 (satu) Pelaksana ASN pada masing-masing seksi dan sub bagian pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Maret 2023
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Kecamatan Balongbendo
Acara : Pembahasan Reviu Renstra Tahun 2021 - 2026

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuhtanggungjawab



ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP., MM

Pembina

NIP. 19790114 199711 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN BALONGBENDO**

JL. Mayjend Bambang Yuwono No. 2 Balongbendo Sidoarjo
Telepon : (031) 8971003 Fax : (031) 8971003
Email : balongbendo@sidoarjokab.go.id
Website : www.balongbendo.sidoarjokab.go.id

NOTULEN RAPAT

Kepada : Yth. Bapak Camat Balongbendo
Dari : Bendahara Sub Bagian dan Perencanaan Keuangan
Tanggal : 28 Maret 2023
Nomor : 050/59/438.7.11/2023
Lampiran : -
Perihal : Hasil Pembahasan Reviu Renstra Tahun 2021 - 2026

I. DASAR

Nota Dinas Camat Balongbendo tanggal 27 Maret 2023 Nomor 005/57/438.7.11/2023 perihal Undangan

II. PELAKSANAAN

Pembahasan Reviu Renstra Tahun 2021 - 2026 dilaksanakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Maret 2023
Pukul : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Kerja Kecamatan Balongbendo

III. HASIL

1. Kegiatan Pembahasan Reviu Renstra Tahun 2021 - 2026 dimulai pada pukul 13.30 WIB dibuka oleh Bapak ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP., MM (Camat Balongbendo).
2. Kegiatan Rapat Koordinasi tersebut dihadiri oleh Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balongbendo beserta masing-masing 1 (satu) orang pelaksana pada masing-masing seksi/ sub bagian.
3. Adapun hasil kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perubahan indikator Prosentase Permasalahan trantibum dari difasilitasi menjadi diselesaikan
 - b. Penghapusan indikator Nilai SKM dan Persentase Serapan.
 - c. Seksi Trantibum mohon untuk mendukung kinerja Sasaran Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan diukur dari Register Permasalahan yang masuk ke Kantor Kecamatan dan sudah diselesaikan.
 - d. Masing-masing Seksi dan Sub Bagian untuk terus mendokumentasikan setiap kegiatan.
 - e. Matriks Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 untuk dipelajari dan dibahas
 - f. Target Renstra untuk diperhatikan agar tercapai karena berpengaruh terhadap kinerja OPD.

- g. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha sudah difasilitasi Bappeda dihapus dari target karena IMB sudah tidak dilaksanakan.

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk.

Notulen



KHAFIDZ KHASAN, A.Md

Penata Muda

NIP. 19860324 201402 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN BALONGBENDO**


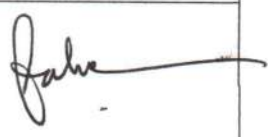
JL. Mayjend Bambang Yuwono No. 2 Balongbendo Sidoarjo
Telepon : (031) 8971003 Fax : (031) 8971003
Email : balongbendo@sidoarjokab.go.id
Website : www.balongbendo.sidoarjokab.go.id

DAFTAR HADIR KEGIATAN

Pembahasan Reviu Renstra Tahun 2021 - 2026

SELASA, 28 MARET 2023

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1	ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM	Camat	Ketua	
2	HARY SUBAGIO, S.Sos	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
3	HAPPY APRILYAWATI, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota	
4	Drs. MOHAMMAD ROFI'I	Plt . Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
5	ARIES BUDIYANTO	Plt. Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota	
6	R. BAMBANG HERY POERWANTO, S.Pd	Kepala Seksi Trantibum	Anggota	
7	ASVI MASCHUROH, S.E, M.Ak	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosia	Anggota	
8	PRASETYO DWI PANGESTI ADJI, A.Md	Plt. Kepala Seksi Pembangunan	Anggota	
9	RIADI	Pengelola Bahan Perencanaan	Anggota	
10	KHAFIDZ KHASAN, A.Md	Bendahara	Anggota	
11			Pelaksana Seksi Pemerintahan	
12			Pelaksana Seksi Trantibum	
13			Pelaksana Seksi Perekonomian	

14	Dwi Endah	Staf.	Pelaksana Seksi Kesos	
15			Pelaksana Seksi Pembangunan	
16	Fahrul As-Had	Pengelola Data Pelayanan	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	



ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP., MM

Pembina

NIP. 19790114 199711 1 001


DOKUMENTASI KEGIATAN
Pembahasan Reviu Renstra Tahun 2021 - 2026
SELASA, 28 MARET 2023





Keterangan :

Peserta Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026 dan diikuti Pelaksana masing-masing seksi dan sub bagian

	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	No. Dok.	065/ s8 /438.7.11/2023
		No. Rev.	01
	REVIU PERUBAHAN RENSTRA	Tanggal	28 Maret 2023
		Halaman	1 dari 7 halaman



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN BALONGBENDO**

REVIU PERUBAHAN RENSTRA

No. Dokumen : 065/ s8 /438.7.11/2023
 Revisi : 01
 Tanggal Terbit : 28 Maret 2023
 Referensi : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah


Disetujui oleh :

CAMAT BALONGBENDO

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM

Pembina

NIP. 19790114 199711 1 001

	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	No. Dok.	065/ 438 /438.7.11/2023
		No. Rev.	01
	REVIU PERUBAHAN RENSTRA	Tanggal	28 Maret 2023
		Halaman	2 dari 7 halaman

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan SOP Reviu Perubahan Renstra adalah untuk memberikan petunjuk atau pedoman bagi tim penyusun dokumen perencanaan dalam melakukan Perubahan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) sehingga dokumen tersusun sesuai dengan kaidah penyusunan yang ditetapkan, dan relevan dengan alasan keberadaan Kecamatan Balongbendo.

2. RUANG LINGKUP


SOP Reviu Perubahan Renstra merupakan implementasi SAKIP pada Kecamatan Balongbendo, mulai dari tahap penentuan isu-isu strategis, perumusan *core business* OPD, analisa SWOT, hingga kesimpulan akhir.

3. DEFINISI

Perubahan Renstra adalah proses melakukan evaluasi atas dokumen Renstra yang telah disusun sebelumnya, dimana evaluasi yang dilakukan meliputi :

1. Ukuran keberhasilan yang tertuang dalam Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
2. Indikator keberhasilan kinerja, baik untuk Tujuan, Sasaran, Program maupun Kegiatan;
3. Target yang telah ditetapkan sebelumnya
4. Capaian kinerja tahun berjalan yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja/ LAKIP

Diharapkan Perubahan akan menghasilkan kualitas dokumen RENSTRA lebih baik dari sebelumnya.

	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	No. Dok.	065/ <i>TS</i> /438.7.11/2023
		No. Rev.	01
	REVIU PERUBAHAN RENSTRA	Tanggal	28 Maret 2023
		Halaman	3 dari 7 halaman

4. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam SOP Reviu Perubahan Renstra antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;


5. TANGGUNGJAWAB

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra adalah sebagai berikut :

5.1 Ketua

Ketua adalah jabatan yang diperankan oleh Camat Balongbendo dengan tugas dan kewajiban antara lain :

- a. Memberikan pengarahan kepada tim Perubahan Renstra secara langsung maupun berjenjang berupa kebijakan dan peraturan daerah berkaitan dengan implementasi SAKIP dan informasi-informasi lain yang dianggap perlu.
- b. Meminta keterangan/informasi dari tim Perubahan Renstra baik secara langsung maupun berjenjang tentang perkembangan pelaksanaan Perubahan Renstra.
- c. Menandatangani laporan hasil Perubahan Renstra yang diajukan setelah melalui proses analisa dan pembahasan secara berjenjang dan menyampaikan laporan hasil Perubahan Renstra.

	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	No. Dok.	065/ SS /438.7.11/2023
		No. Rev.	01
	REVIU PERUBAHAN RENSTRA	Tanggal	28 Maret 2023
		Halaman	4 dari 7 halaman

5.2 Sekretaris

Sekretaris adalah jabatan yang diperankan oleh Sekretaris Kecamatan Balongbendo dengan tugas dan kewajiban antara lain :

- a. Memastikan pemberitahuan akan dilaksanakan Perubahan telah terkirim kepada masing-masing pelaksana kegiatan;
- b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pemanfaatan sarana-prasarana penunjang untuk melaksanakan Perubahan Renstra antara lain sarana mobilisasi, alat-alat ukur, ATK dll;
- c. Membantu ketua untuk memperoleh informasi awal yang diperlukan dari tim Perubahan Renstra;
- d. Membantu ketua untuk menyampaikan informasi yang diperlukan kepada tim Perubahan Renstra;
- e. Membantu penanggungjawab untuk melakukan Perubahan atas laporan hasil Perubahan Renstra;
- f. Memverifikasi laporan hasil Perubahan Renstra;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua dalam rangka kelancaran Perubahan Renstra.

5.3 Anggota

Anggota adalah jabatan yang diperankan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan tugas dan kewajiban antara lain :

- a. Melaksanakan kegiatan Perubahan Renstra yang dihadiri oleh seluruh pelaksana kegiatan
- b. Memberikan pertimbangan yang diperlukan atas permasalahan yang dijumpai pada Perubahan Renstra, dengan memberikan penjelasan teknis.
- c. Melakukan komunikasi dengan ketua atas permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan Perubahan Renstra, untuk memastikan proses Perubahan Renstra berjalan dengan lancar.
- d. Melakukan Perubahan dan validasi atas usulan perubahan dari masing-masing pelaksana kegiatan, dengan menilai kecukupan relevansinya dengan kaidah penyusunan yang ada.
- e. Selanjutnya menyampaikan keputusan dimaksud kepada Camat Balongbendo.

	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	No. Dok.	065/ 38 /438.7.11/2023
		No. Rev.	01
	REVIU PERUBAHAN RENSTRA	Tanggal	28 Maret 2023
		Halaman	5 dari 7 halaman

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua dalam rangka kelancaran Perubahan Renstra.

5 URAIAN PROSEDUR

1. Camat Balongbendo memerintahkan seluruh pelaksana kegiatan untuk melakukan Perubahan kinerjanya.
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sekretaris Kecamatan Balongbendo menghimpun usulan / konsep perubahan Renstra.
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melaporkan hasil usulan perubahan Renstra kepada Sekretaris Kecamatan Balongbendo.
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mengadakan acara pembahasan usulan perubahan Renstra.
5. Usulan perubahan Renstra dibahas bersama dengan dipimpin oleh Camat Balongbendo.
6. Setelah pembahasan final dan di setujui bersama, laporan diberikan ke Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk diagenda dan dimintakan tanda tangan
7. Laporan hasil Perubahan Renstra yang sudah ditanda tangani siap untuk dipublikasikan

6. ALUR SOP




**STANDARD OPERATING PROCEDURE
(SOP)**

No. Dok. 065/ 58 /438.7.11/2023
 No. Rev. 01
 Tanggal 28 Maret 2023
 Halaman 6 dari 7 halaman

REVIU PERUBAHAN RENSTRA

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku		
		Camat Balongbendo	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris Kecamatan Balongbendo	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Memerintahkan untuk Perubahan kinerjanya							
2	Membuat draft konsep usulan perubahan					Capaian Kinerja	1 Hari	Usulan
3	Menghimpun usulan / konsep perubahan					Draft	3 Hari	Format
4	Mengadakan Rapat pembahasan Perubahan Renstra					Draft	1 hari	Usulan Perubahan
5	Analisa dan Pembahasan usulan perubahan					Tim	1 hari	Rapat
6	Paraf persetujuan hasil Perubahan					Usulan perubahan	3 Hari	Laporan Perubahan Renstra
7	Publikasi hasil rewiw					Laporan Perubahan Renstra	3 hari	Berita Acara Perubahan
						Berita Acara Perubahan	1 hari	Dokumentasi

	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	No. Dok.	065/ 58 /438.7.11/2023
		No. Rev.	01
	REVIU PERUBAHAN RENSTRA	Tanggal	28 Maret 2023
		Halaman	7 dari 7 halaman

6 CATATAN MUTU

Dokumen pendukung yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini :

- a. Data Pendukung Kualitas IKU
- b. Laporan Kinerja OPD
- c. Laporan Kinerja Individu
- d. Matriks Renstra 2021 - 2026
- e. DPPA Tahun 2021
- f. DPPA Tahun 2022
- g. Rancangan Akhir Renja Tahun 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN BALONGBENDO**

JL. Mayjend Bambang Yuwono No. 2 Balongbendo Sidoarjo

Telepon : (031) 8971003 Fax : (031) 8971003

Email : balongbendo@sidoarjokab.go.id

Website : www.balongbendo.sidoarjokab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT BALONGBENDO
NOMOR : 188/62/438.7.11/2023**

TENTANG

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO**

**CAMAT BALONGBENDO
KABUPATEN SIDOARJO**

- Menimbang** :
- a. Sehubungan telah dilakukan penyempurnaan ukuran kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan reviu/penyempurnaan terhadap Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Bahwa sesuai dengan yang dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir terhadap dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, serta dalam rangka tertib administrasi akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah, perlu menetapkan Keputusan Camat Balongbendo tentang Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dengan Keputusan Camat Balongbendo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/3774/SJ tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman Persetujuan Perda Tentang Perangkat Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor S Seri D);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 61);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SP4D) (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 75);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 109);
28. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
29. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 050/555/438.6.1/2023 Tanggal 27 Maret 2023 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renstra PD Tahun 2021 - 2026

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo
- PERTAMA** : Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah dengan periode selama 5 (lima) tahun yang akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja) OPD; dokumen penganggaran, yaitu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); serta sebagai dokumen pendukung Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balongbendo
Tanggal : 31 Maret 2023



CAMAT BALONGBENDO

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM
Pembina
NIP.19790114 199711 1 001

	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (.....Laporan)	NA Laporan	NA Laporan		NA Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	0	100%	16.499.164	100%	140.062.000	100%	218.933.118	100%	188.721.738	100%	190.873.038	100%	190.873.038
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (.....kegiatan)	0 Kegiatan	0 kegiatan	0	1 kegiatan	15.499.164	2 kegiatan	140.062.000	5 kegiatan	218.933.118	6 kegiatan	188.721.738	6 kegiatan	190.873.038	5 kegiatan	190.873.038
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan	a. Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan (.....kegiatan)	a. 0 kegiatan	a. 1 kegiatan	0	a. 1 kegiatan	15.499.164	a. NA kegiatan	54.862.000	a. NA kegiatan	153.120.615	a. NA kegiatan	142.046.738	a. NA kegiatan	142.896.038	a. NA kegiatan	142.896.038
	b. Jumlah lomba-lomba yang dilaksanakan untuk memperingati hari besar nasional (.....kegiatan)	b. 0 kegiatan	b. 0 kegiatan		b. 0 kegiatan		b. NA kegiatan		b. NA kegiatan		b. NA kegiatan		b. NA kegiatan		b. NA kegiatan	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (.....orang)	NA Orang	NA Orang		NA Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan Forkopimka yang dilaksanakan (.....kegiatan)	NA Kegiatan	NA Kegiatan	0	NA Kegiatan	0	NA Kegiatan	41.850.000	NA Kegiatan	52.312.500	NA Kegiatan	32.500.000	NA Kegiatan	32.500.000	NA Kegiatan	32.500.000
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (..... Dokumen)	NA Dokumen	NA Dokumen		NA Dokumen	4	4 Dokumen	4	4 Dokumen	4	4 Dokumen	4	4 Dokumen	4	4 Dokumen	4
Pembinaan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi pilkada, pilgub, pilpres (.....desa)	NA Desa	NA Desa	0	NA Desa	0	NA Desa	43.350.000	NA Desa	13.500.000	NA Desa	14.175.000	NA Desa	15.375.000	NA Desa	15.375.000
	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (..... Lembaga masyarakat)	NA Lembaga Masyarakat	NA Lembaga Masyarakat		NA Lembaga Masyarakat	4	4 Lembaga Masyarakat	4	4 Lembaga Masyarakat	4	4 Lembaga Masyarakat	4	4 Lembaga Masyarakat	4	4 Lembaga Masyarakat	4
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	48.282.500	100%	4.178.000	100%	69.900.000	100%	87.422.600	100%	96.164.780	100%	106.781.226	100%	106.781.226
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu (.....desa)	20 Desa	20 Desa	48.282.500	20 Desa	4.178.000	20 Desa	69.900.000	20 Desa	87.422.600	20 Desa	96.164.780	20 Desa	106.781.226	20 Desa	106.781.226

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rhdasar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja PD yang disusun	2 laporan	2 laporan	1.289.620	2 laporan	0	NA laporan	0	NA laporan	81.252.600	NA laporan	85.250.000	NA laporan	80.000.000	NA laporan	80.000.000	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rhdasar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	NA laporan	NA laporan		NA laporan		NA laporan		NA laporan		NA laporan		NA laporan		NA laporan		
	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rhdasar Realisasi Kinerja SKPD (.... Laporan)	NA laporan	NA laporan		NA laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan		3 laporan		3 laporan		3 laporan		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen moner PD yang disusun	4 laporan	4 laporan		0	4 laporan	0	NA laporan	0	NA laporan	72.000.000	NA laporan	73.500.000	NA laporan	80.000.000	NA laporan	80.000.000
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (. Laporan)	NA laporan	NA laporan		NA laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	93%	94%	3.491.960.798	94%	3.691.728.933	96%	4.096.170.236	97%	4.292.478.747	98%	4.387.866.989	99%	4.682.666.603	98%	4.682.666.603	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan ASN	29 Orang	29 Orang	3.467.079.643	29 Orang	3.591.728.933	NA orang	4.096.170.236	NA orang	4.270.978.747	NA orang	4.368.385.086	NA orang	4.644.556.053	NA orang	4.644.556.053	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (.... Orang/bulan)	NA orang	NA orang		NA orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		
Pelaksanaan Peratuasan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diterbitkan	214 dokumen	300 dokumen	618.127	300 dokumen	0	NA dokumen	0	NA dokumen	9.000.000	NA dokumen	9.000.000	NA dokumen	6.500.000	NA dokumen	6.500.000	
	Jumlah Dokumen Peratuasan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (.... Dokumen)	NA dokumen	NA dokumen		NA dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	110.000	1 Laporan	0	NA laporan	0	NA laporan	3.500.000	NA laporan	3.500.000	NA laporan	1.500.000	NA laporan	1.500.000	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (.... Laporan)	NA laporan	NA laporan		NA laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	12 Laporan	12 Laporan	4.152.988	12 Laporan	0	NA laporan	0	NA laporan	9.000.000	NA laporan	9.000.000	NA laporan	9.500.000	NA laporan	9.500.000	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (.... Laporan)	NA laporan	NA laporan		NA laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	a. Persentase ASN yang disiplin	a. 100 %	a. 100 %	1.687.509	a. 100 %	0	a. 100 %	78.478.000	a. 100 %	172.600.000	a. 100 %	173.328.000	a. 100 %	230.600.000	a. 100 %	230.600.000	
	b. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	b. 0 %	b. 0 %		b. 0 %		b. 0 %		b. 0 %		b. 0 %		b. 0 %		b. 0 %		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan	1 paket	0 paket	0	0	0	NA paket	4.995.000	NA paket	36.000.000	NA paket	30.000.000	NA paket	32.500.000	NA paket	32.500.000	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (.... Paket)	NA paket	NA paket		NA paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		

	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (..... Laporan)	NA laporan	NA laporan		NA laporan		250 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
Pengadaan Barang Milik Daerah	Jenis BMD yang diadakan	16 unit	0 unit	113.885.762	0 unit	73.930.790	NA unit	592.840.634	NA unit	638.981.361	NA unit	676.900.000	NA unit	2.372.600.000	NA unit	2.372.600.000	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	2 jenis	2 jenis		0 jenis		5 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis		
Pengadaan Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	0 unit	0 unit		0	0 unit	73.930.790	NA unit	0	NA unit	0	NA unit	0	NA unit	360.000.000	NA unit	360.000.000
	Jumlah Unit Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Disediakan (..... Unit)	NA unit	NA unit		NA unit		0 unit		0 unit		0 unit		0 unit		0 unit		
Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	NA unit	0	NA unit	0	NA unit	0	NA unit	360.000.000	NA unit	360.000.000	
	Jumlah Unit Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (..... Unit)	NA unit	NA unit		NA unit		0 unit		0 unit		0 unit		0 unit		0 unit		
Pengadaan Mebel	Jenis meubelekr yang diadakan	6 Jenis	0 Jenis	16.364.400	0 Jenis	0	NA Jenis	152.110.152	NA Jenis	196.000.000	NA Jenis	207.900.000	NA Jenis	900.000.000	NA Jenis	900.000.000	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (..... Paket)	NA paket	NA paket		NA paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	8 Unit	0 Unit	97.491.362	0 Unit	0	NA Unit	400.830.342	NA Unit	440.981.351	NA Unit	483.000.000	NA Unit	752.500.000	NA Unit	752.500.000	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (..... Unit)	NA unit	NA unit		NA unit		1 unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100%	100%	773.660.200	100%	906.899.300	100%	930.287.700	100%	938.462.700	100%	938.462.700	100%	1.073.280.000	100%	1.073.280.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 bulan	12 bulan	142.000.000	12 bulan	146.840.000	NA bulan	195.885.000	NA bulan	165.000.000	NA bulan	165.000.000	NA bulan	173.250.000	NA bulan	173.250.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (..... Laporan)	NA laporan	NA laporan		NA laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	a. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	a. 3 orang	a. 3 orang	631.560.200	a. 3 orang	652.149.200	a. NA orang	674.402.700	a. NA orang	674.402.700	a. NA orang	674.402.700	a. NA orang	900.000.000	a. NA orang	900.000.000	
	b. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	b. 0 orang	b. 0 orang		b. 0 orang		b. NA orang		b. NA orang		b. NA orang		b. NA orang		b. NA orang		
	c. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar;	c. 14 orang	c. 15 orang		c. 15 orang		c. NA orang		c. NA orang		c. NA orang		c. NA orang		c. NA orang		
	d. Jumlah tenaga non ADN yang terbayar	d.11 orang	d.11 orang		d.11 orang		d.NA orang		d.NA orang		d.NA orang		d.NA orang		d.NA orang		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (..... Laporan)	NA laporan	NA laporan		NA laporan		17 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	40 unit	37 unit	475.890.000	37 unit	199.800.000	NA unit	311.000.000	NA unit	297.600.000	NA unit	297.600.000	NA unit	297.600.000	NA unit	297.600.000	
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi	NA %	NA %		NA %		100%		100%		100%		100%		100%		

Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan lembaga sosial, agama dan masyarakat yang telah dilaksanakan (...kegiatan)	0 kegiatan	3 kegiatan	20.275.000	3 kegiatan	9.137.500	NA kegiatan	53.947.500	NA kegiatan	86.315.000	NA kegiatan	100.206.500	NA kegiatan	115.678.150	NA kegiatan	115.678.150
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (...Laporan)	NA Laporan	NA Laporan		NA Laporan		5 Laporan		1 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang difasilitasi (...permasalahan)	1 permasalahan	8 permasalahan	64.760.000	6 permasalahan	26.194.500	6 permasalahan	14.250.000	8 permasalahan	36.005.000	6 permasalahan	36.000.000	6 permasalahan	36.000.000	6 permasalahan	36.000.000
Koordinasi/energi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	a. Jumlah operasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan (...kegiatan)	a. 4 kegiatan	a. 12 kegiatan	54.750.000	a. 12 kegiatan	25.194.500	a. NA kegiatan	14.250.000	a. NA kegiatan	36.000.000	a. NA kegiatan	36.000.000	a. NA kegiatan	36.000.000	a. NA kegiatan	36.000.000
	b. Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang terdaftar (...permasalahan)	b. 1 permasalahan	b. 8 permasalahan		b. 6 permasalahan		b. NA permasalahan		b. NA permasalahan	b. NA permasalahan	b. NA permasalahan	b. NA permasalahan	b. NA permasalahan	b. NA permasalahan	b. NA permasalahan	b. NA permasalahan
	c. Jumlah monv bidang ketertaman dan ketertban umum yang dilaksanakan (...kegiatan)	c. 4 kegiatan	c. 4 kegiatan		c. 4 kegiatan		c. NA kegiatan		c. NA kegiatan	c. NA kegiatan	c. NA kegiatan	c. NA kegiatan	c. NA kegiatan	c. NA kegiatan	c. NA kegiatan	c. NA kegiatan
	Jumlah Laporan Koordinasi/energi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (...Laporan)	NA Laporan	NA Laporan		NA Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan	



Balongbendo, 31 Maret 2023
CAMAT BALONGBENDO

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM
NIP. 19790114 199711 1 001